

2024

LKjIP

**DINAS PENANAMAN MODAL &
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PRABUMULIH**



dpmpptsp.kotaprabumulih.go.id



[dpmpptsp_prabumulih](https://www.instagram.com/dpmpptsp_prabumulih)



DPMPTSP Kota Prabumulih

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih dapat diselesaikan.

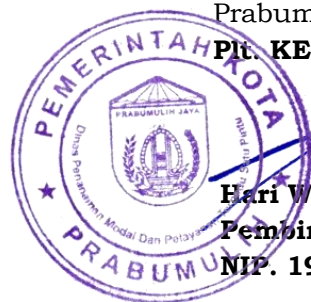
LKjIP DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024 disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2024. Penyusunan laporan ini juga merupakan bentuk konsistensi dan komitmen kami untuk menginformasikan hasil pencapaian kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan serta pencapaian nilai investasi dari program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024 secara transparan dan akuntabel.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan hambatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan LKjIP DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2024.

Prabumulih, 24 Januari 2025

Pt. KEPALA DINAS,



Hari Wahyudi, SH., M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 19811030 201101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi	1
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Sarana dan Prasarana	6
1.2.3 Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11
1.2.4 Anggaran	12
1.2.5 Dasar Hukum	12
1.2.6 Sistematika Laporan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	15
2.1.1. Tujuan	15
2.1.2. Sasaran Strategis	15
2.2 Rencana Kerja Tahun 2024	20
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
BAB III AKUNTABILIAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja	28
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	28
3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun 2024	29
3.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Akhir Tahun 2024	34
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	48
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	49
3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	52
3.2 Realisasi Anggaran	60
BAB IV PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024 Berdasarkan Golongan.....	5
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024 Berdasarkan Jabatan.....	5
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan	6
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024	6
Tabel 1.5	Daftar Barang/Aset DPMPTSP Kota Prabumulih	7
Tabel 1.6	Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024	12
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja PD Tahun 2024-2026	16
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024	16
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahun 2024	20
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	22
Tabel 2.5	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP	23
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	29
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024	30
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	34
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Kinerja Strategi	48
Tabel 3.5	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	49
Tabel 3.6	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	51
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	52
Tabel 3.8	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024	5
Gambar 3.1 Grafik Kontribusi PMA dan PMDN Kota Prabumulih Tahun 2024	35
Gambar 3.2 Grafik Perfoma Investasi Kota Prabumulih Tahun 2021 s.d 2024	36
Gambar 3.3 Analisis Capaian Nilai Investasi PMA dan PMDN Tahun 2023 s.d 2024	41
Gambar 3.4 Nilai IKM DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2021 s.d 2024	41
Gambar 3.5 Grafik Jenis Izin yang diterbitkan Tahun 2022 s.d 2024	42
Gambar 3.6 Grafik Jenis Izin Terbanyak yang diterbitkan Tahun 2024	43
Gambar 3.7 Piagam Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	44
Gambar 3.8 Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah	45
Gambar 3.9 Piagam Penghargaan Pengawasan Kearsipan Dinamis Internal PD Kota Prabumulih	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui rencana kinerja dan perjanjian kinerja serta melaporkan akuntabilitas pelaksanaan kerjanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih adalah unsur pelaksana tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Prabumulih melalui Sekretaris Daerah Kota Prabumulih. DPMPTSP Kota Prabumulih wajib mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menyusun LKjIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip *Good Governance* yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah, prestasi sebuah instansi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja. Hasil evaluasi tersebut adalah masukan bagi instansi untuk meningkatkan kerjanya. Penyusunan LKjIP berorientasi pada hasil realistis yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sesuai visi dan misi Pemerintah Kota Prabumulih, tujuan/sasaran dan program, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014) dan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 64 Tahun 2015 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Prabumulih. Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur Penanaman Modal serta Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014) dan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 64 Tahun 2015 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas :

- a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal serta menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah dibidang penyelenggaraan penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- c) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyelenggaraan Program dan perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b) Penyelenggaraan penyerderhanaan birokrasi dan prosedur penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c) Penyelenggaraan penyerderhanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d) Penyelenggaraan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e) Penyelenggaraan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah teknis;
- f) Penyelenggaraan pelaksanaan kerja dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan kinerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- g) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi proses pemberian penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- h) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

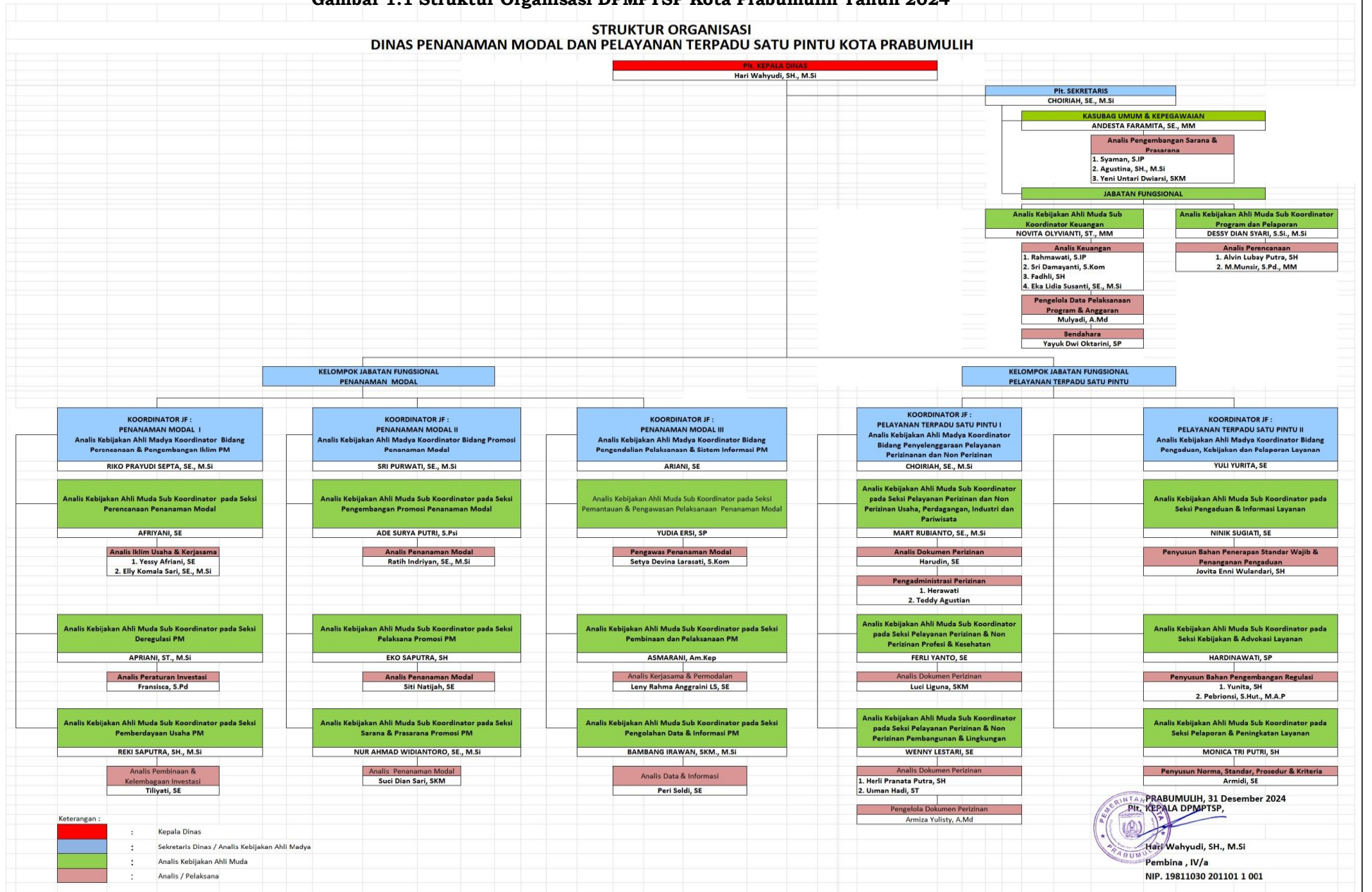
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Susunan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Keuangan;
 - 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi:
 - 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Deregulasi Penanaman Modal;
 - 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal.
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi:
 - 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
 - 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahi:
 - 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahi:

1. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub pada Seksi Koordinator Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Usaha, Perdagangan, Industri dan Pariwisata;
 2. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan, Lingkungan dan Penanaman Modal;
 3. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Profesi dan Kesehatan.
- g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi:
1. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 2. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan;
 3. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator pada Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPMPSTP Kota Prabumulih Tahun 2024



Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, DPMPSTSP Kota Prabumulih per tanggal 31 Desember 2024 memiliki sumber daya manusia sebanyak 82 orang dengan rincian 59 orang PNS, 9 orang PPPK dan 14 orang non PNS.

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2024 Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	I	-	-	-
2.	II	1	1	2
3.	III	14	33	47
4.	IV	4	6	10
5.	VII (PPPK)	0	3	3
6.	IX (PPPK)	3	3	6
7.	Non Golongan	3	11	14
Jumlah		25	57	82

Sumber: Data Kepegawaian DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2024

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai DPMPSTSP Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	-	-	-
3.	Eselon IV	-	1	1
4.	Fungsional	14	27	41
5.	Pelaksana	8	17	25
6.	Non ASN	3	11	14
Jumlah		26	56	82

Sumber: Data Kepegawaian DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2024

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai DPMPPTSP Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 2 (S-2)	8	15	23
2.	Strata 1 (S-1)	13	26	39
3.	Diploma 3	1	8	9
4.	Diploma 2	-	1	1
4.	SLTA	4	6	10
Jumlah		26	56	82

Sumber: Data Kepegawaian DPMPPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024

1.2.2 Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Berikut merupakan daftar Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Prabumulih Tahun 2023, yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana DPMPPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1.	Gedung	1	1 Unit (2 Lantai)
2.	Listrik	1	Jaringan
3.	Air Sumur Bor	1	Jaringan
4.	Telepon dan Internet	1	Line
5.	Area Parkir	3	Area (Mobil, Motor, Difabel)
6.	Ruang Rapat	1	Ruang
7.	Ruang Arsip	1	Ruang
8.	Klinik OSS dan LKPM	1	Ruang

Sumber: Kartu Inventaris Barang, Data SIMDA Barang DPMPPTSP Tahun 2024

Tabel 1.5 Daftar Barang/Aset DPMTSP Kota Prabumulih

No.	Jenis Barang	Asal Usul	Tahun	Jumlah
1	Kursi lipat	Hibah	2007	11
2	Personal komputer lenovo	Pembelian	2008	1
3	AC spilit LG	Pembelian	2008	1
4	AC unit TCL	Pembelian	2008	3
5	Kursi putar futura	Pembelian	2008	1
6	AC spilit panasonic	Pembelian	2009	1
7	Alat pengukur waktu lain-lain	Pembelian	2009	2
8	Hard disk	Pembelian	2009	1
9	Dispenser sanken SANKEN	Pembelian	2009	1
10	Kursi kerja pejabat eselon 3 donalti	Pembelian	2009	1
11	Kursi lipat futura	Pembelian	2009	3
12	Kursi kerja eselon IV	Pembelian	2009	3
13	Kursi putar chitose	Pembelian	2009	2
14	Kursi putar donalti	Pembelian	2009	5
15	Kursi tunggu/ panjang	Pembelian	2009	2
16	Laptop Apple	Pembelian	2009	2
17	Meja biro	Pembelian	2009	3
18	Meja biro DONALTI	Pembelian	2009	1
19	Meja biro SUCITRA	Pembelian	2009	3
20	Meja bundar donati	Pembelian	2009	1
21	Mesin ketik manual longewagen Olympia	Pembelian	2009	1
22	Mesin ketik manual standardBrother	Pembelian	2009	1
23	Modem	Pembelian	2009	1
24	Meja tulis	Pembelian	2009	9
25	PC unit LENOVO	Pembelian	2009	9
26	Meja komputer	Pembelian	2009	6
27	Meja panjang counter operator	Pembelian	2009	1
28	PC unit SERVER IBM	Pembelian	2009	1
29	Peralatan personal komputer lain-lain window	Pembelian	2009	1
30	Rak buku besar	Pembelian	2009	4
31	Rak buku kecil	Pembelian	2009	4
32	Rak televisi	Pembelian	2009	1
33	Scanner Cannon LED2000	Pembelian	2009	1
34	Sofa	Pembelian	2009	1

No.	Jenis Barang	Asal Usul	Tahun	Jumlah
35	Printer HP	Pembelian	2009	1
36	Stabilizer	Pembelian	2009	3
37	Televisi Sharp	Pembelian	2009	1
38	Unit Power Supply ICA	Pembelian	2009	9
39	Unit Power Supply 2200 kva	Pembelian	2009	1
40	Printer Cannon	Pembelian	2009	1
41	Printer Cannon	Pembelian	2009	9
42	Kendaraan Dinas Mobil AVANZA	Pembelian	2009	1
43	Meja pejabat eselon IV SUBARU	Pembelian	2012	3
44	Kendaraan Dinas Sepeda motor YAMAHA	Pembelian	2012	1
45	Facsimile PANASONIC	Pembelian	2012	2
46	Lemari besi LION	Pembelian	2012	1
47	Meja biro orbitrend	Pembelian	2012	3
48	Laptop Samsung 915S	Pembelian	2013	2
49	Printer Cannon	Pembelian	2013	5
50	Camera + attachment cannon eos	Pembelian	2013	1
51	Global Positioning System GARMIN	Pembelian	2013	1
52	Lemari arsip untuk arsip dinamis MODERA	Pembelian	2013	7
53	Meja kerja pejabat lain-lain MODERA	Pembelian	2013	11
54	Meja kerja pejabat lain-lain YUBI	Pembelian	2013	19
55	PC unit HP PAV	Pembelian	2013	5
56	AC unit MAYAKA	Pembelian	2014	4
57	AC unit SHARP	Pembelian	2014	17
58	Pompa air SHIMIDZHU	Pembelian	2014	1
59	Brankas KRISBOW	Pembelian	2014	1
60	Exhause fan FANASONIC	Pembelian	2014	6
61	Generator listrik MAYAKO	Pembelian	2014	1
62	Gorden/hordeng	Pembelian	2014	1
63	Kendaraan Dinas Sepeda motor YAMAHA	Pembelian	2014	4
64	Kipas angin SEKAI	Pembelian	2014	2
65	Papan nama instansi LOCAL	Pembelian	2015	1
66	Wireless FARENHEIT	Pembelian	2015	1
67	AC unit SHARP	Pembelian	2016	3
68	Filling besi /metal SPRING	Pembelian	2016	1
69	Kursi putar BROTHER	Pembelian	2016	3

No.	Jenis Barang	Asal Usul	Tahun	Jumlah
70	Kursi rapat BROTHER	Pembelian	2016	15
71	Laptop LENOVO	Pembelian	2016	1
72	Personal komputer HP	Pembelian	2016	2
73	Printer Cannon	Pembelian	2016	2
74	Meja tulis MODERA	Pembelian	2016	22
75	Kendaraan Dinas Mobil INNOVA	Pembelian	2017	1
76	CCTV LOKAL	Pembelian	2018	1
77	Filling besi/metal VIP	Pembelian	2018	5
78	Kipas angin MITOCHIBA	Pembelian	2018	1
79	Kursi lipat CHITOSE	Pembelian	2018	6
80	Kursi putar ACHILES	Pembelian	2018	6
81	Meja biro ORBITREN	Pembelian	2018	6
82	PC unit LENOVO	Pembelian	2018	4
83	Printer Cannon	Pembelian	2018	4
84	AC unit SHARP	Pembelian	2019	3
85	Gorden / hordeng	Pembelian	2019	7
86	Kipas angin	Pembelian	2019	2
87	Kursi lipat	Pembelian	2019	20
88	Kursi lipat FORTUNE	Pembelian	2019	12
89	Kursi tunggu panjang	Pembelian	2019	2
90	Laptop ASUS X441M	Pembelian	2019	6
91	Laptop ASUS TP412F	Pembelian	2019	2
92	Lemari arsip	Pembelian	2019	3
93	Lemari kayu	Pembelian	2019	2
94	Meja kerja pejabat eselon II LOKAL	Pembelian	2019	1
95	Meja panjang	Pembelian	2019	3
96	Meja pejabat eselon IV	Pembelian	2019	2
97	Meja rapat Lokal	Pembelian	2019	1
98	PC unit	Pembelian	2019	4
99	PC unit LENOVO	Pembelian	2019	1
100	Printer Cannon MP230	Pembelian	2019	14
101	Printer Epson L3110	Pembelian	2019	1
102	Proyektor Epson + attachment	Pembelian	2019	1
103	Sofa LILY	Pembelian	2019	1
104	Unit Power Supply ICA	Pembelian	2019	1
105	Printer Epson L3110 (Scanner)	Pembelian	2021	2
106	Laptop N4000 (Ram 4 GB, 14 inchi) Acer	Pembelian	2021	1
107	AC Unit (Pembelian	2021	3

No.	Jenis Barang	Asal Usul	Tahun	Jumlah
108	Lemari Arsip - Merk High-Point 1 Lemari Arsip Tinggi Kaca + Panel ST- 437 Lemari Arsip Tinggi, Arsip Pintu Kaca dengan Bawah Pintu Panel Warna Beech	Pembelian	2021	1
109	Perangkat Tanda Tangan Elektronik (Samsung Galaxy S20 Fe)	Pembelian	2021	1
110	PC Accer/ C22	Hibah	2022	1
111	Printer Canon MP 237/ Multifuction Infus	Hibah	2022	1
112	Modem Advan/ CPE Router Star	Hibah	2022	1
113	Kursi Kerja Direktur Cyrus Staf Office Black Chair	Pembelian	2023	1
114	Kursi Kerja Zuan Staff Chair Black	Pembelian	2023	1
115	Kursi Kerja Liza Folding Chair Black	Pembelian	2023	10
116	Kursi Tunggu Front Office Greesa Relax Sofa Black PU-A1	Pembelian	2023	2
117	Kursi Putar Bulat Anaya Bar Stool Brown	Pembelian	2023	5
118	Notebook/ Laptop Asus Vivo i3	Pembelian	2023	2
119	Printer Epson L3250	Pembelian	2023	2
120	Printer Scanner HP Deskjet 2775	Pembelian	2023	2
121	Ac Split Midea 2,5 PK	Pembelian	2023	1
122	Kursi Kerja	Pembelian	2023	4
123	Kursi Plastik Napolly	Pembelian	2023	50
124	Meja Kerja 1 Biro	Pembelian	2023	4
125	Mesin Penghacur Kertas Secure Maxi 15 A	Pembelian	2023	2
126	Ac Midea 2 PK	Pembelian	2023	3
127	Tablet Samsung CT6/ Galaxy Tab	Pembelian	2023	1
128	Notebook/ Laptop Asus Vivo Book x415ea a1400ea	Pembelian	2023	1
129	PC Sim - V	Pembelian	2023	10
130	Printer Epson L3210	Pembelian	2023	1
131	Printer Scanner Canon Pixma MG2570S	Pembelian	2023	7
132	Genset 10 KVA TLPS Silent	Pembelian	2024	1

Sumber: Kartu Inventaris Barang, Data SIMDA Barang DPMPSTP Tahun 2024

1.2.3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Kota Prabumulih dengan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu: meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan DPMPTSP, meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan/non perizinan dan meningkatkan realisasi investasi di Kota Prabumulih.

Sejauh ini kinerja pengelolaan di DPMPTSP Kota Prabumulih masih perlu terus dioptimalkan, sehingga penyelenggaraan penanaman modal yang berkelanjutan dan pelayanan terpadu satu pintu dapat menjadi lebih baik.

Salah satu isu penting yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Prabumulih sampai saat ini adalah belum tersedianya dokumen informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (*master plan, feasibility study, Detail Engineering Design dan business plan*) yang dibutuhkan oleh calon investor. Dokumen ini dapat memberi kemudahan bagi calon investor untuk menemukan potensi Kota Prabumulih berdasarkan data dan informasi yang valid, serta dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan ekonomi yang sedang tumbuh di Kota Prabumulih dan juga potensi pengembangan berbagai sektor ekonomi di Kota Prabumulih. Selain belum tersedianya dokumen tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan lainnya seperti:

1. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan dan penanaman modal;
2. Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian kemudahan berinvestasi di Kota Prabumulih;
3. Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Prabumulih belum diperbarui, sehingga sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
4. Belum terpenuhinya secara maksimal sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Publik;
5. Promosi penanaman modal belum optimal dalam menarik investor di Kota Prabumulih;
6. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal masih terbatas dan belum mutakhirnya data informasi penanaman modal kota Prabumulih;
7. Pendidikan dan Pelatihan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu masih sangat terbatas;
8. Belum optimalnya kemitraan usaha antara PMA/PMDN dengan UMKM.

9. Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Prabumulih belum beroperasi secara optimal dan belum adanya Dokumen Penandatanganan Komitmen atas kesanggupan penyelenggaraan MPP.

1.2.4 Anggaran

Akuntabilitas Kinerja Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024 ditunjukkan dari sisi Perencanaan Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dimana Anggaran Belanja DPMPTSP Kota Prabumulih sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2024 ditetapkan sebesar Rp8.490.302.277,- yang mengalami peningkatan sebesar Rp453.828.571,- atau 5,66% dari anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp8.036.473.706,- ini dikarenakan Kebijakan Pemerintah mendorong keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menginginkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah serta peningkatan investasi penanaman modal di Kota Prabumulih, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2023	Rp8.036.473.706,-
APBD	2024	Rp8.490.302.277,-

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP Tahun 2023 dan 2024

1.2.5 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
13. Peraturan Walikota Kota Prabumulih Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

1.2.6 Sistematika Laporan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih selama Tahun 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPSTP kota Prabumulih Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih dan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPSTSP kota Prabumulih Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2.1.1 Tujuan

Tujuan OPD merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan berpedoman kepada pernyataan visi dan misi Walikota Prabumulih serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;**
- 2. Terlaksananya Realisasi Investasi Penanaman Modal ditunjang Pelayanan Perizinan/Non Perizinan yang Prima dan Berkualitas.**

2.1.2 Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah:

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPSTP Kota Prabumulih;**
- 2. Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;**
- 3. Peningkatan dan Pengembangan Investasi Daerah.**

Indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2024-2026**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.1 .1	Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Prabumulih	1.1. 1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	175	225	275
1.4 .1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.4. 1.1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	90	90	90
1.4 .2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1.4. 2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	A (90)	A (90)	A (90)
				Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100	100	100

Sumber: Renstra DPMPSTSP Tahun 2024-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.1. 1	Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Prabumulih	1.1.1#. 1	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	Tingkat Pertumbuhan Investasi adalah persentase perubahan dalam nilai investasi dalam suatu periode waktu tertentu,	Tingkat Pertumbuhan Investasi = (Investasi Akhir - Investasi Awal) dibagi Investasi Awal × 100%	Data Primer dan Sekunder DPMPSTSP

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					yang biasanya digunakan untuk mengukur seberapa cepat investasi berkembang atau tumbuh dalam jangka waktu tertentu		
1.1. 1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN	1.1.1.1# 0.1	Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Milyar	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN berarti total nilai investasi yang telah direalisasikan oleh investor asing (PMA) dan investor domestik (PMDN) dalam periode waktu tertentu. Biasanya, data ini digunakan untuk menggambarkan seberapa besar aliran investasi ke dalam suatu negara atau daerah, yang menjadi indikator penting dalam menilai iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.	Jumlah Realisasi Investasi = Realisasi Investasi PMA + Realisasi Investasi PMDN	Data Primer dan Sekunder DPMPSTP

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.4. 1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.4.1.# 1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai Indeks SKM X Nilai Dasar Interval dengan Hasil Nilai Indeks SKM	Data Primer dan Sekunder DPMPSTP
1.4. 1.1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1.4.1.1# 0.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai Indeks SKM X Nilai Dasar Interval dengan Hasil Nilai Indeks SKM	Data Primer dari Pelaku Usaha
1.4. 2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1.4.2.# 1	Nilai SAKIP Kota	Nilai	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah di tingkat kota. SAKIP mencakup beberapa komponen	Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB	Data Primer dan Sekunder DPMPSTP

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					utama, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja		
1.4. 2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.4.2.1# 0.1	Nilai SAKIP OPD	Predikat (Nilai)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik terhadap OPD. Nilai Tertimbang Jawaban: Hasil perkalian nilai jawaban dengan bobot masing-masing unsur. Jumlah Responden: Banyaknya pengguna layanan yang disurvei. Jumlah Unsur Pelayanan: Komponen atau indikator pelayanan yang dinilai.	Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB melalui Inspektorat	Data Primer dan Sekunder DPMPSTSP
			Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persen	Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan adalah indikator yang mengukur	Persentase Tindak lanjut = (Jumlah Temuan Tindaklanjut dibagi Jumlah Temuan	Data Primer dan Sekunder DPMPSTSP

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					sejauh mana temuan-temuan yang dihasilkan dalam kegiatan pengawasan telah direspon dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berkepentingan	Total) × 100%	

Sumber: Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026

2.2 Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah meliputi penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih Tahun 2024 ini memuat program dan kegiatan, serta pagu indikatif seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Prabumulih	1.1.	Meningkatnya Realisasi	Jumlah Peluang Investasi Daerah yang Potensial	Dokumen	1
		1.1	Investasi PMA dan PMDN	Persentase Kegiatan Pameran Penanaman Modal	Dokumen	1
				Persentase Pelaku Usaha	Persen (%)	100

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
				yang dipantau, dibina dan diawasi		
				Jumlah Dokumen Penanaman Modal dan Perizinan yang terintegrasi secara elektronik	Dokumen	1
1.4.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.4. 1.1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Rasio Pelayanan Perizinan	Persen (%)	100
				Persentase Pengaduan yang diselesaikan	Persen (%)	100
1.4.2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1.4. 2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen (%)	100

Sumber: Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja seluruh pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Prabumulih	Tingkat Pertumbuhan Investasi	4
1.1.1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	175
1.4.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78
1.4.1.1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	90
1.4.2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	B (>60-70)
1.4.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB (>70-80) "Target 2023"
		Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan	100

Sumber: Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih:

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2024**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1.1. 1	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Kegiatan Usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	8 Kegiatan Usaha
1.1.1.1. 1.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	100 Pelaku Usaha
1.1.1.1. 1.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	30 Kegiatan Usaha
1.1.1.1. 1.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	40 Pelaku Usaha
1.1.1.1. 1.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan Usaha
1.1.1.1. 2	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Perizinan dan Penanaman Modal	3 Dokumen
1.1.1.1. 2.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi di Kota Prabumulih	3 Dokumen
1.1.1.1. 2.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1.1.3	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Peluang Investasi Daerah yang Potensial	1 Dokumen
1.1.1.1.3.2	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peluang Investasi Kota Prabumulih	1 Dokumen
1.1.1.1.3.2.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen
1.1.1.1.4	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen
1.1.1.1.4.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal	2 Dokumen
1.1.1.1.4.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen
1.4.1.1.1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelayanan Penanaman Modal	3000 Pelaku Usaha
1.4.1.1.1.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu	2700 Pelaku Usaha
1.4.1.1.1.1.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha
1.4.1.1.1.1.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12 Pelaku Usaha
1.4.2.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %
1.4.2.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu	100 %
1.4.2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	
1.4.2.1. 1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
1.4.2.1. 1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
1.4.2.1. 1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen
1.4.2.1. 1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen
1.4.2.1. 1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Laporan Keuangan disampaikan Tepat waktu	100 %
1.4.2.1. 1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan
1.4.2.1. 1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
1.4.2.1. 1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
1.4.2.1. 1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen
1.4.2.1. 1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase dokumen BMD yang disampaikan tepat waktu	100 %
1.4.2.1. 1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.2.1. 1.3.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
1.4.2.1. 1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi umum Perkantoran	100 %
1.4.2.1. 1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
1.4.2.1. 1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
1.4.2.1. 1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
1.4.2.1. 1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
1.4.2.1. 1.4.5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
1.4.2.1. 1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
1.4.2.1. 1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	100 %
1.4.2.1. 1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit
1.4.2.1. 1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
1.4.2.1. 1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
1.4.2.1. 1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
1.4.2.1. 1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
1.4.2.1. 1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
1.4.2.1. 1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD	100 %
1.4.2.1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.7.1	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
1.4.2.1. 1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit

Sumber: Renja DPMPTSP Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Untuk melihat tahapan capaian kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran dapat dilihat dari pengukuran kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan serta target yang telah ditetapkan. Kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih diukur berdasarkan tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui target kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Berdasarkan pengukuran secara mandiri (*self assessment*) atas sasaran strategis DPMPTSP Kota Prabumulih maka diperoleh hasil pengukuran terhadap capaian kinerja prioritas DPMPTSP Kota Prabumulih.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Instansi Pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tertuang pada perjanjian kinerja. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama yang tertuang pada perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Prabumulih	Tingkat Pertumbuhan Investasi	4%	-70,92%	-1773%	Sangat Rendah	Data Primer dan Sekunder DPMPSTSP
1.1.1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp175 Milyar	Rp109,73 Milyar	62,70%	Rendah	Data Primer dan Sekunder DPMPSTSP
1.4.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	89,53	114,7%	Sangat Tinggi	Data Primer dan Sekunder DPMPSTSP
1.4.1.1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	90	93	103,33%	Sangat Tinggi	Data Primer dari Pelaku Usaha
1.4.2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	B (>60-70)	B (60,86)	100%	Sangat Tinggi	Data Primer dan Sekunder DPMPSTSP
1.4.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB (>70-80) "Target 2023"	BB (74,81) "Realisasi Tahun 2023"	100%	Sangat Tinggi	Data Primer dan Sekunder DPMPSTSP
		Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Data Primer dan Sekunder DPMPSTSP

Sumber: Renstra DPMPSTSP Tahun 2024-2026

Berdasarkan tabel tingkat Pencapaian kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 103,33 persen yang melebihi target yang mana target sebesar 90 dengan realisasi 93 (capaian sebesar 103,33 persen dengan kategori Sangat Tinggi). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa Faktor Pendukung yaitu:
 - Sarana dan Prasarana DPMPSTSP Kota Prabumulih sudah dalam Kategori Baik;
 - Kompetensi pelayanan yang sudah meningkat;
 - Digitalisasi Sistem pelayanan yang sangat membantu.
- b. Indikator Nilai Sakip OPD berhasil mencapai target nilai sakip BB (71-80) dengan realisasi BB (74,81), (capaian sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi) merupakan target dan realisasi nilai sakip tahun 2023 dikarenakan nilai sakip tahun 2024 per Januari 2025 belum keluar. Prihal tercapainya target nilai sakip ini dipengaruhi oleh beberapa Faktor Pendukung yaitu :
 - Proses pelaksanaan penyusunan SAKIP sudah sesuai ketentuan peraturan, komitmen kepala OPD yang kuat;
 - Kompetensi tenaga pengelola SAKIP OPD yang memadai;
 - Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- c. Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan, berhasil mencapai target 100 persen, dengan capaian kinerja 100 persen dan Kategori Sangat Tinggi. Temuan hasil pengawasan telah ditindaklanjuti semua karena koordinasi yang baik antara pegawai di DPMPSTSP Kota Prabumulih sebagai faktor pendukung.
- d. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan capaian kinerja 62.70 persen dengan kategori Rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa Faktor Penghambat yaitu :
 - Belum adanya regulasi khusus terkait kemudahan berinvestasi PMA dan PMDN untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif;

- Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang merupakan salah satu instrumen penting untuk memantau perkembangan investasi, baik PMA maupun PMDN;
- Pelaku usaha tidak melaporkan ulang Realisasi Investasi ke Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online sesuai hasil Review Kementerian Investasi/BKPM Pusat;
- Pelaku usaha Non UMK yang wajib melaporkan tidak ada tambahan realisasi lagi pada kegiatan usahanya.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Tahun 2024

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021, 2022 dan 2023, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp298,85 Milyar	Rp446,59 Milyar	Rp377,34 Milyar	Rp175 Milyar	Rp109,73 Milyar	62,70
1.4.1.1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,39	88,59	90,15	90	93	103,33
1.4.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B (61,90) "Realisasi Tahun 2020"	BB (72,57) "Realisasi Tahun 2021"	BB (79,08) "Realisasi Tahun 2022"	BB (71-80) "Target Tahun 2023"	BB (74,81) "Realisasi Tahun 2023"	100
		Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100

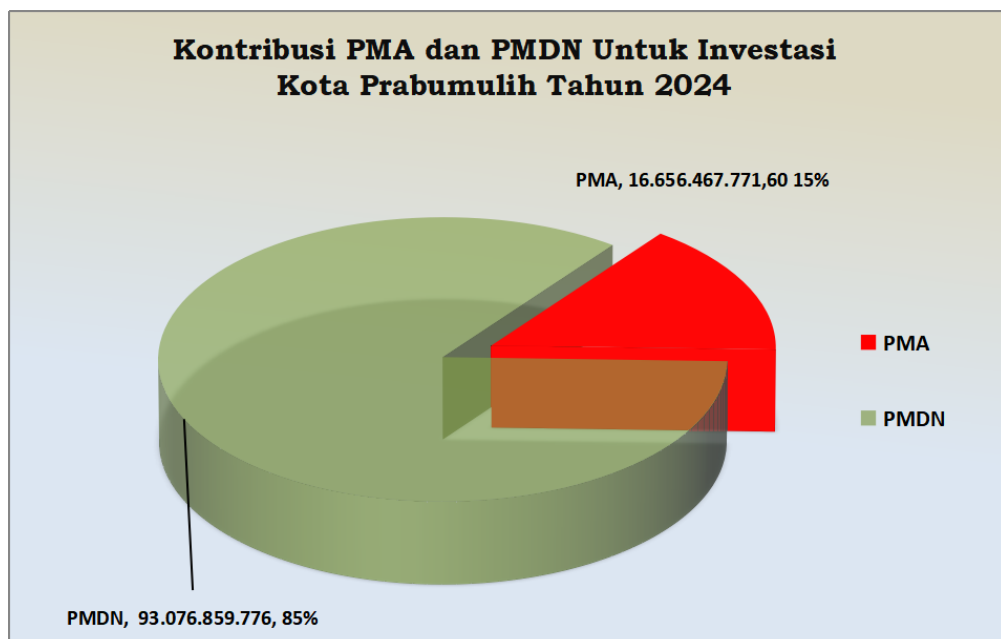
Sumber: Renstra DPMPSTP Tahun 2024-2026

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala (Pasal 1 angka (20) Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021). LKPM ini disampaikan setiap triwulan bagi perusahaan yang sedang dalam proses pembangunan atau belum berproduksi, dan laporan semester wajib bagi perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi. Pelaku usaha wajib melaporkan seluruh kegiatan penanaman modalnya melalui *aplikasi LKPM online*.

DPMPTSP Kota Prabumulih sebagai instansi yang membidangi penanaman modal Kota Prabumulih melaksanakan kegiatan pemantauan investasi di Kota Prabumulih secara rutin melalui LKPM online, dan didapatkan data total nilai realisasi investasi di Kota Prabumulih tahun 2024 sebesar Rp109.733.327.547,60,- (*Seratus Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Rupiah*).

Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN Iklim Penanaman Modal yang kondusif dapat dilihat dari sebanyak 1 (satu) **Indikator Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**. Adapun berdasarkan jenisnya, realisasi investasi penanaman modal dibagi 2 (dua) yaitu: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berikut besaran kontribusi PMA dan PMDN atas nilai total investasi Kota Prabumulih tahun 2024.

Gambar 3.1 Grafik Kontribusi PMA dan PMDN Kota Prabumulih Tahun 2024

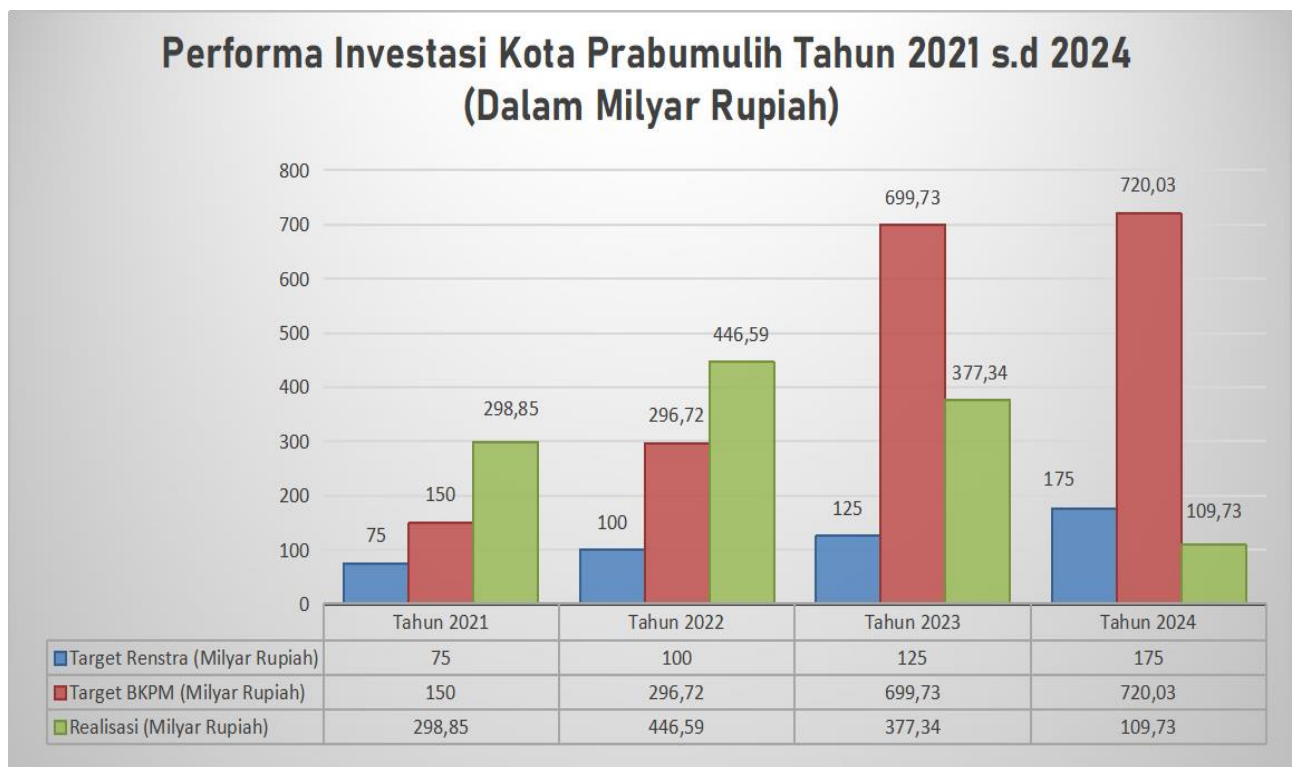


Sumber: NSWI dan LKPM Online 2024. Diolah

Berdasarkan grafik di atas, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki kontribusi dominan dengan total nilai investasi sebesar Rp93,07 milyar (85%) dibandingkan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp16,65 milyar (15%) sepanjang tahun 2024. Realisasi investasi PMA di Kota Prabumulih berasal dari investor negara Belanda (Sektor Perhotelan dan Restoran; Sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran serta Sektor Jasa Lainnya), Malaysia (Sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan), Singapura (Sektor Perdagangan dan Reparasi) dan Kepulauan Virgin Inggris/Amerika (Sektor Pertambangan dan Sektor Jasa Lainnya).

Untuk performa investasi Kota Prabumulih dari tahun 2021 sampai 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.2 Grafik Performa Investasi Kota Prabumulih Tahun 2021 s.d 2024



Sumber: NSWI dan LKPM Online 2024. Diolah

Salah satu tujuan strategis DPMPSTSP Kota Prabumulih selain meningkatnya tata kelola dan kualitas pelayanan publik adalah meningkatnya realisasi investasi penanaman modal di Kota Prabumulih. Setiap tahun target investasi Kota Prabumulih sudah ditentukan pada awal pembuatan Renstra DPMPSTSP 2024-2026. Dari grafik di atas, realisasi investasi kota Prabumulih dari tahun 2021 s.d tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

- Tahun 2021 DPMPTSP Kota Prabumulih berdasarkan Renstra dibebankan target investasi sebesar Rp75.000.000.000,- (*Tujuh puluh lima milyar rupiah*). Realisasi Investasi Kota Prabumulih Tahun 2021 Rp298.850.711.987,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*). Sektor konstruksi dan peternakan menjadi penyumbang terbesar investasi pada tahun 2021. Dari data tersebut telah melampaui target yang ditentukan diatas, dengan pencapaian persentase sebesar 398,47% dari target yang telah ditentukan pada Renstra. Secara matematis, pencapaian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Capaian Investasi Tahun 2021} &= \frac{\text{Nilai Realisasi Investasi Tahun 2021}}{\text{Nilai Target Investasi Tahun 2021}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 298.850.711.987}{\text{Rp } 75.000.000.000} \times 100\% \\
 &= 398,47\%
 \end{aligned}$$

- Tahun 2022 DPMPTSP Kota Prabumulih berdasarkan Renstra dibebankan target investasi sebesar Rp100.000.000.000,- (*Seratus milyar rupiah*). Realisasi Investasi Kota Prabumulih Tahun 2022 Rp446.597.264.375,- (*Empat Ratus Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*). Sektor perdagangan, khususnya toko retail modern, peternakan ayam, dan konstruksi, menjadi kontributor utama investasi di kota Prabumulih. Dari data tersebut telah melampaui target yang ditentukan diatas, dengan pencapaian persentase sebesar 446,59% dari target Renstra yang telah ditentukan. Secara matematis, pencapaian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Capaian Investasi Tahun 2022} &= \frac{\text{Nilai Realisasi Investasi Tahun 2022}}{\text{Nilai Target Investasi Tahun 2022}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 446.597.264.375}{\text{Rp } 100.000.000.000} \times 100\% \\
 &= 446,59\%
 \end{aligned}$$

- Tahun 2023 mempunyai target investasi sebesar Rp125.000.000.000,- (*Seratus Dua Puluh Lima Milyar Rupiah*), sedangkan Realisasi Investasi Kota Prabumulih Tahun 2023 sebesar Rp377.342.618.121,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah*). Sektor jasa lainnya, konstruksi, dan perdagangan tetap memberikan kontribusi signifikan

terhadap investasi di Kota Prabumulih. Dari data tersebut DPMPTSP telah mampu melampaui target yang ditentukan diatas, dengan pencapaian persentase sebesar 301,88% dari target yang telah ditentukan berdasarkan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih. Secara matematis, pencapaian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Capaian Investasi Tahun 2023} &= \frac{\text{Nilai Realisasi Investasi Tahun 2023}}{\text{Nilai Target Investasi Tahun 2023}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 377.342.618.121}{\text{Rp } 125.000.000.000} \times 100\% \\ &= \mathbf{301,88\%}\end{aligned}$$

- Tahun 2024 Target Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN adalah sebesar Rp175.000.000.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah*), dengan Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN sebesar Rp109.733.327.547,60,- (*Seratus Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Rupiah*) dengan capaian sebesar 62,70%. Secara matematis, pencapaian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Capaian Investasi Tahun 2024} &= \frac{\text{Nilai Realisasi Investasi Tahun 2024}}{\text{Nilai Target Investasi Tahun 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 109.733.327.547.60}{\text{Rp } 175.000.000.000} \times 100\% \\ &= \mathbf{62,70\%}\end{aligned}$$

Pada tahun 2024 terjadi penurunan nilai investasi kota Prabumulih yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp267,6 Milyar dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan beberapa pelaku usaha dengan kategori menengah ke atas, tidak lagi melakukan kegiatan penanaman modal dan juga beberapa pelaku usaha mengurangi nilai investasinya di Tahun 2024 karena kegiatan konstruksi sebagian telah selesai di tahun 2023. Adapun pelaku usaha diuraikan sebagai berikut:

Gambar 3.3 Analisis Capaian Nilai Investasi PMA dan PMDN Tahun 2023 s.d 2024

No.	Nama Perusahaan	Status	Sektor	Investasi 2024 (Rp)	Investasi 2024 (Rp)	Penurunan Realisasi Investasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ace Hardware Indonesia	PMDN	Perdagangan dan Reparasi	1.119.700.000	0	1.119.700.000
2.	Cindo Abadi Perkasa	PMDN	Konstruksi Perdagangan dan Reparasi	24.692.500.000	0	24.692.500.000
3.	Fadhila Medika Centra	PMDN	Jasa lainnya	11.200.000.000	0	11.200.000.000
4.	Hardinata Prabujaya	PMDN	Perdagangan dan Reparasi Jasa lainnya	150.000.000 17.085.000.000	0	17.235.000.000
5.	Rekso Nasional Food (Mc.D)	PMDN	Hotel dan Restoran	17.179.300.000	0	17.179.300.000
6.	Oil Perkasa Trading	PMDN	Perdagangan dan Reparasi	3.550.000.000	0	3.550.000.000
7.	Perta-Samtan Gas	PMA (Korsel)	Listrik, Gas dan Air	11.267.233.638	142.529.764	11.124.703.874
8.	Pertamina Bina Medika	PMDN	Jasa lainnya	75.688.100.000	145.500.000	75.542.600.000
9.	Cipta Karya Baru		Perdagangan dan Reparasi; Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran; Jasa Lainnya; Konstruksi; Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	20.975.800.000	1.288.500.000	19.687.300.000
10.	Sampoerna Indah Lestari	PMDN	Konstruksi; Perdagangan dan Reparasi	27.110.000.000	300.000.000	26.810.000.000
11.	Samudra Motor	PMDN	Jasa Lainnya; Perdagangan dan Reparasi; Hotel dan Restoran	24.997.300.000	787.000.000	24.210.300.000
12.	Schlumberger Geophysics Nusantara	PMA (Inggris)	Pertambangan	16.732.866.993	2.762.662.191	13.970.204.802
13.	Titis Sampurna	PMDN	Listrik, Gas dan Air	11.024.800.000	1.270.093.200	9.754.706.800

Dapat dilihat bahwa target dan Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN belum mencapai target dengan capaian sebesar 62,70%. Belum adanya kebijakan yang jelas dan terstruktur mengenai kemudahan investasi baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) seperti Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Kemudahan Penanaman Modal di Kota Prabumulih, Layanan pada Mal Pelayanan Publik yang belum optimal dan belum adanya Kajian Potensi Investasi Kota Prabumulih, hal ini bisa menjadi faktor utama yang menghambat tercapainya target investasi selain beberapa faktor terkait pelaku usaha tidak melaporkan ulang Realisasi Investasi ke Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online sesuai hasil Review Kementerian

Investasi/BKPM Pusat serta Pelaku usaha Non UMK yang wajib melaporkan tidak ada tambahan realisasi lagi pada kegiatan usahanya.

Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Kota Prabumulih melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang kemudahan berinvestasi. Langkah ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Prabumulih. Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan pada tahun 2024, performa investasi Kota Prabumulih dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif dengan capaian yang signifikan melebihi target dari tahun 2021 dan 2023.

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih melaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat 2 (dua) periode selama per tahun, yaitu pada Semester Pertama dilaksanakan pada bulan Januari s.d Juni dan Semester Kedua pada bulan Juli s.d Desember. Sebagai dasar hukum kegiatan survey ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Variabel penelitian yang digunakan dalam survei kepuasan masyarakat ini terdiri dari 9 (sembilan) variabel, yaitu: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu/kecepatan pelayanan, biaya/tarif, kesesuaian produk layanan, kompetensi pelaksana layanan, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana.

Capaian kinerja indikator 1 **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**. Berdasarkan Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dapat dilihat perbandingan Target dan Realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dari tahun 2021 s.d tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

• **Survey Kepuasan Masyarakat (Periode Januari – Desember 2021)**

Responden untuk Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah Pelanggan atau Masyarakat Pembuat Izin pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Terdiri dari 100 sampai 200 Orang Responden yang dipilih secara acak/ random pada saat pengguna izin menngambil izin yang sudah selesai. Lokasi dari Pengumpulan data sendiri dilakukan pada *Front Office* loket 4. Berdasarkan Hasil Nilai Indeks Unit Pelayanan

perizinan di DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2021 diperoleh hasil, **Nilai IKM Tahun 2021 adalah 85,39 dengan Mutu Layanan “B”**, serta Kinerja Unit Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih pada tahun 2021 adalah **”BAIK“**. Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2021 ini dilaksanakan di tengah Pemulihan Ekonomi dan New Normal pasca pandemi covid-19. Walaupun demikian survei tetap dijalankan dengan segala keterbatasan sehingga diperoleh 150 responden yang bisa mengisi kuesioner. Akan tetapi nilai ini belum melebihi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 88.

- **Survey Kepuasan Masyarakat (Periode Januari – Desember 2022)**

Responden untuk Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah Pelanggan atau Masyarakat Pembuat Izin pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Terdiri dari 100 sampai 200 Orang Responden yang dipilih secara acak/ random pada saat pengguna izin menngambil izin yang sudah selesai. Lokasi dari Pengumpulan data sendiri dilakukan pada *Front Office* loket 4. Berdasarkan Hasil Nilai Indeks Unit Pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2022 diperoleh hasil, **Nilai IKM 88.59** yang memiliki **Mutu Pelayanan “A”** serta Kinerja Unit Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih pada tahun 2022 adalah **”SANGAT BAIK“**. Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2022 ini dilaksanakan di tengah Pemulihan Ekonomi dan New Normal pasca pandemi covid-19. Walaupun demikian survei tetap dijalankan dengan segala keterbatasan sehingga diperoleh 150 responden yang bisa mengisi kuesioner. Akan tetapi nilai ini telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 88.

- **Survey Kepuasan Masyarakat (Periode Januari – Desember 2023)**

Responden untuk Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah Pelanggan atau Masyarakat Pembuat Izin pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Terdiri dari 100 sampai 200 Orang Responden yang dipilih secara acak/ random pada saat pengguna izin menngambil izin yang sudah selesai. Lokasi dari Pengumpulan data sendiri dilakukan pada *Front Office* loket 4. Berdasarkan Hasil Nilai Indeks Unit Pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2023 diperoleh hasil, **Nilai IKM 90.15** yang memiliki **Mutu Pelayanan “A”** serta Kinerja Unit Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih pada tahun 2023 adalah **”SANGAT BAIK“**. Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023 ini dilaksanakan guna mendukung Presiden Joko Widodo dan pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi digital di sektor pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan, sehingga diperoleh 150 responden yang bisa mengisi kuesioner. Dan nilai ini telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 88.

- **Survey Kepuasan Masyarakat (Periode Januari – Desember 2024)**

Responden untuk Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah Pelanggan atau Masyarakat Pembuat Izin pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Terdiri dari 100 sampai 200 Orang Responden yang dipilih secara acak/ random pada saat pengguna izin menngambil izin yang sudah selesai. Lokasi dari Pengumpulan data sendiri dilakukan pada *Front Office* loket 4. Berdasarkan Hasil Nilai Indeks Unit Pelayanan perizinan di DPMPSTSP Kota Prabumulih tahun 2024 diperoleh hasil, **Nilai IKM 93** yang memiliki **Mutu Pelayanan “A”** serta Kinerja Unit Pelayanan DPMPSTSP Kota Prabumulih pada tahun 2024 adalah **”SANGAT BAIK“**. Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 ini dilaksanakan guna mendukung Presiden Joko Widodo dan pemerintah Indonesia terus memperluas penggunaan aplikasi digital untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan publik. Hal ini termasuk pengembangan lebih lanjut dari platform Online Single Submission (OSS) yang memungkinkan pengurusan izin usaha dan perizinan lainnya dilakukan secara digital dan terintegrasi, sehingga diperoleh 150 responden yang bisa mengisi kuesioner. Dan nilai ini telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 90.

Gambar 3.4 Nilai IKM DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2021 s.d 2024

NILAI IKM							
2021		2022		2023		2024	
Nilai IKM	Mutu Layanan	Nilai IKM	Mutu Layanan	Nilai IKM	Mutu Layanan	Nilai IKM	Mutu Layanan
85,39	B	88,59	A	90,15	A	93	A

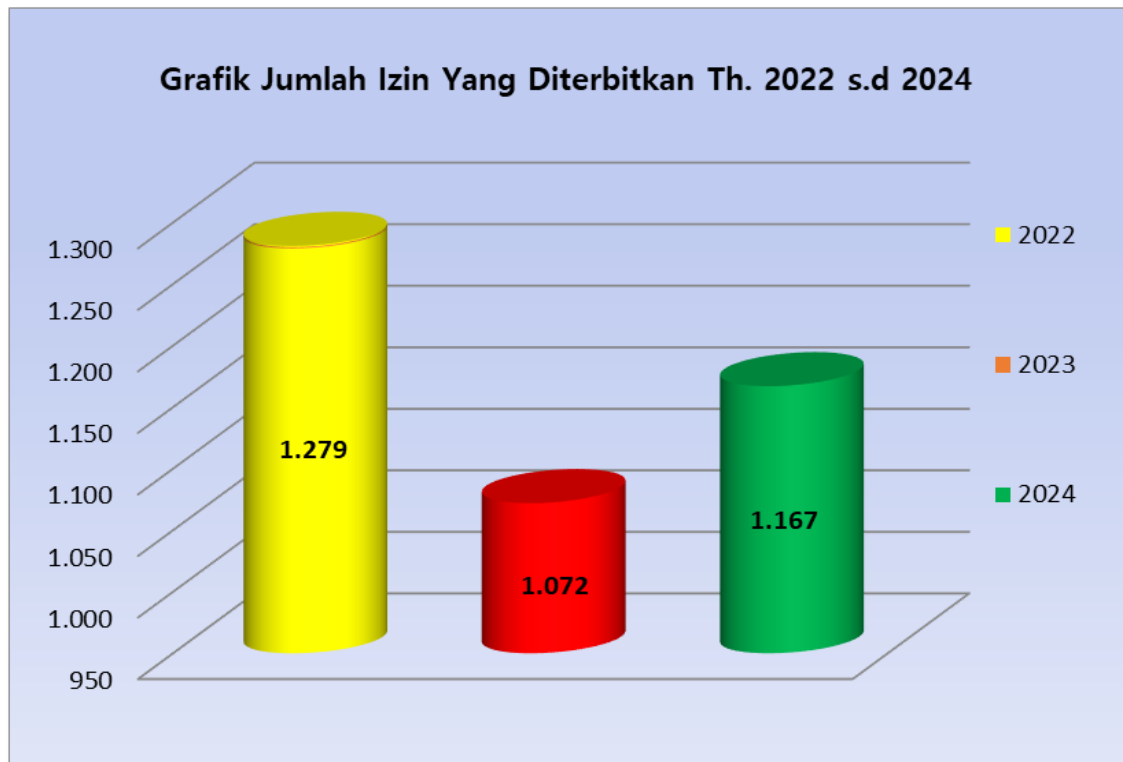
Sumber: Laporan SKM DPMPSTSP Kota Prabumulih Th. 2021-2024

DPMPSTSP Kota Prabumulih mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam pelaksanaannya, DPMPSTSP Kota Prabumulih bersinergi dengan berbagai lembaga vertikal guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya meningkatkan kinerja organisasi layanan publik yang harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai kebutuhannya. Cara yang harus dilakukan meliputi merubah *mindset* birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat, penataan kelembagaan pelayan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dalam manajemen pelayanan, penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik serta penanganan pengaduan

masyarakat yang selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Dalam era digitalisasi ini, bidang perizinan DPMPTSP Kota Prabumulih telah menerapkan sistem Tanda Tangan Elektronik/TTE (*Digital Signature*) dalam dokumen dinas perizinan usaha sejak tahun 2019, dengan menggunakan TTE ini artinya DPMPTSP Kota Prabumulih telah melaksanakan tujuan strategis dari *e-government* yaitu menata sistem manajemen dan proses kerja secara holistik serta memanfaatkan teknologi secara optimal. Adapun jumlah izin yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 3.5 Grafik Jenis Izin yang diterbitkan Tahun 2022 s.d 2024



Sumber: Bidang Perizinan, DPMPTSP Kota Prabumulih

Pada grafik diatas, jumlah izin yang diterbitkan DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024 adalah sebanyak **1.167 (Seribu seratus enam puluh tujuh) izin**, dan mengalami peningkatan jumlah izin yang diterbitkan sebesar 8,86% jika dibandingkan dengan tahun 2023. (Data lengkap perizinan yang diterbitkan dapat dilihat pada lampiran).

Menciptakan investasi berkelanjutan menuju peningkatan ekonomi Kota Prabumulih sesuai Kebijakan Pemerintah serta mendorong peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik sudah menjadi keharusan DPMPTSP Kota Prabumulih sebagai OPD yang bertanggung jawab dalam pelayanan penanaman modal.

DPMPTSP Kota Prabumulih berkomitmen untuk meningkatkan Layanan Perizinan dan Non Perizinan agar beroperasi secara optimal bagi masyarakat yang datang langsung ke kantor DPMPTSP Kota Prabumulih serta bagi masyarakat yang berkendala untuk datang ke kantor atau yang akan mengurus perizinan secara *online* dapat menggunakan layanan sistem *Online Single Submission* (OSS) atau perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik secara mandiri.

Dari 6 (*Enam*) sektor dengan 73 (*Tujuh puluh tiga*) jenis izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2024, berikut 5 jenis izin terbanyak yang diterbitkan dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 3.6 Grafik Jenis Izin Terbanyak yang diterbitkan Tahun 2024



Sumber: Bidang Perizinan, DPMPTSP Kota Prabumulih

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih setiap tahun mendapatkan penilaian Ombudsman sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan berjalan sesuai dengan standar yang baik dan memenuhi harapan masyarakat. Pada tanggal 16 Desember 2024, **“Ombudsman Republik Indonesia melalui Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan”** telah memberikan **“Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik)”**, Nilai 92,94 Kategori **“A”** dengan **Opini Kualitas Tertinggi**.

Gambar 3.7 Piagam Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik)



Kota Prabumulih melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menerima **Apresiasi dan Penghargaan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia** sebagai **Kota yang mendapatkan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan**

Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Kategori “BAIK”. Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah tahun 2024 ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan memfasilitasi kegiatan berusaha, serta seberapa efektif implementasi kebijakan dan program terkait.

Gambar 3.8 Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah



Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Kondusif dapat dilihat dari sebanyak 2 (dua) indikator yaitu:

Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dikeluarkan oleh Inspektorat dengan melakukan evaluasi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja OPD. Evaluasi dilakukan terhadap dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja,

Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja OPD. Capaian Kinerja Indikator Pertama Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, **Indikator Nilai SAKIP OPD** dapat dilihat yaitu:

- **Pada tahun 2020** yang lalu hasil evaluasi DPMPTSP Kota Prabumulih memperoleh nilai sebesar **61,90** dengan kategori **“B”** masuk dalam interpretasi Baik dan sesuai target yang telah ditetapkan, yang berarti Akuntabilitas kinerjanya baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
- **Pada tahun 2021** yang lalu hasil evaluasi DPMPTSP Kota Prabumulih memperoleh nilai sebesar **72,57** dengan kategori **“BB”** masuk dalam interpretasi **Sangat Baik** dan sesuai target yang telah ditetapkan, yang berarti Akuntabilitas kinerjanya sangat baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
- **Pada tahun 2022** yang lalu hasil evaluasi DPMPTSP Kota Prabumulih memperoleh nilai sebesar **79,08** dengan kategori **“BB”** masuk dalam interpretasi **Sangat Baik** dan sesuai target yang telah ditetapkan, yang berarti Akuntabilitas kinerjanya sangat baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
- **Pada tahun 2024** yang lalu hasil evaluasi DPMPTSP Kota Prabumulih memperoleh nilai sebesar **74,81** dengan kategori **“BB”** masuk dalam interpretasi **Sangat Baik** dan sesuai target yang telah ditetapkan, yang berarti Akuntabilitas kinerjanya sangat baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Untuk tahun 2024 ini **target nilai SAKIP DPMPTSP** adalah **“A”** tetapi untuk hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja DPMPTSP TA 2024, belum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat sampai dengan bulan Februari 2024.

Indikator Kedua Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Indikator Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan. **Indikator Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan** adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa efektif tindakan yang diambil terhadap temuan yang dihasilkan dari suatu proses pengawasan. Ini mengacu pada seberapa banyak temuan hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti

atau direspon sesuai dengan rekomendasi atau hasil analisis pengawasan. Indikator ini biasanya digunakan dalam konteks pengawasan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengukur kinerja pengawasan dan sejauh mana hasil temuan dapat diperbaiki atau diperhatikan. Indikator Sasaran Indikator Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan di DPMPTSP Kota Prabumulih tidak ada tren kenaikan maupun penurunan pada tahun 2021-2024 dan sudah ditindaklanjuti atau direspon sesuai dengan rekomendasi atau hasil analisis pengawasan.

Akuntabilitas kinerja merujuk pada kewajiban suatu organisasi atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, baik secara internal (kepada manajemen atau pimpinan) maupun eksternal (kepada publik, pemerintah, atau pihak yang berwenang). Ini mencakup bagaimana lembaga atau organisasi dapat menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta mengelola sumber daya secara efisien, efektif, dan transparan.

Kearsipan adalah komponen yang sangat penting dalam tata kelola organisasi yang baik. Dengan pengelolaan arsip yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa informasi yang ada dikelola dengan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya akan mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan. Kearsipan dapat dianggap sebagai faktor kunci dalam akuntabilitas kinerja. Sebuah lembaga atau organisasi yang mengelola arsip dengan baik menunjukkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tanpa sistem kearsipan yang terstruktur dan terorganisir, sangat sulit bagi suatu lembaga untuk memastikan bahwa kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan secara efektif. Pada tanggal 26 November 2024, **“Pj. Walikota Prabumulih telah memberikan Apresiasi dan Penghargaan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih sebagai Perangkat Daerah Kota Prabumulih, dengan Nilai 60,84 Kategori B (BAIK) dalam Rangka Pengawasan Kearsipan Dinamis Internal Perangkat Daerah Kota Prabumulih Tahun 2024”**.

**Gambar 3.9 Piagam Penghargaan Pengawasan Kearsipan Dinamis
Internal Perangkat Daerah Kota Prabumulih**



3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Kinerja Strategi

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Strategi Kinerja	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Prabumulih	Tingkat Pertumbuhan Investasi	-70,92	4	-1773
1.1.1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	109,73	175	62,70
1.4.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,53	78	114,78
1.4.1.1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	93	90	103,33

1.4.2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	B (60,86)	B (>60-80)	100
1.4.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB (74,81)	BB (>70-80)	100
		Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan	100	100	100

Sumber: Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026

Pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026 DPMPTSP Kota Prabumulih, Indikator Tujuan terdiri dari 2 (dua), yaitu:

1. Indikator Tujuan Tingkat Pertumbuhan Investasi yang memiliki progres sebesar -1773% dari target akhir, karena nilai realisasi investasi mengalami penurunan pada tahun 2024;
2. Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat yang memiliki progress yang sangat baik sebesar 114,78% dari target akhir sebesar 78%;
3. Indikator Tujuan Nilai SAKIP Kota sudah memiliki progress sebesar 100% dan telah mencapai target akhir.

Pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026 DPMPTSP Kota Prabumulih, Indikator Sasaran terdiri dari 4 (empat), yaitu:

1. Indikator Sasaran Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang memiliki progres sebesar 62,70% dari target akhir, karena nilai realisasi investasi mengalami penurunan pada tahun 2024;
2. Indikator Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang memiliki progress sebesar 103,33% dan sudah melampaui dari target akhir;
3. Indikator Sasaran Nilai SAKIP OPD sudah memiliki progress sebesar 100% dan telah mencapai target akhir;
4. Indikator Sasaran Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan sudah mencapai target akhir dengan progress sebesar 100% sesuai hasil audit.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Prabumulih	Tingkat Pertumbuhan Investasi	4	-70,92	-1773	1. Daya dukung investasi yang kurang optimal 2. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan LKPM	a. Meningkatkan asistensi LKPM dan terobosan asistensi LKPM b. Menyusun profiling pelaku usaha di Kota Prabumulih c. Menyusun sistem pengawasan & pemantauan d. Pembuatan IPRO Potensi Investasi e. Mendorong penguatan branding kota Prabumulih
1.1.1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	175	109,73	62,70	1. Belum adanya regulasi khusus terkait kemudahan berinvestasi 2. Rendahnya kesadaran para pelaku usaha untuk melaporkan LKPM 3. Pelaku usaha tidak melaporkan ulang Realisasi Investasi ke Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online sesuai hasil Review Kementerian Investasi/BKPM Pusat 4. Pelaku usaha Non UMK yang wajib melaporkan tidak ada tambahan realisasi lagi pada kegiatan usahanya	a. Meningkatkan asistensi LKPM dan terobosan asistensi LKPM b. Menyusun profiling pelaku usaha di Kota Prabumulih c. Menyusun sistem pengawasan & pemantauan d. Membuat regulasi khusus terkait kemudahan berinvestasi e. Pembuatan IPRO Potensi Investasi f. Mendorong penguatan branding kota Prabumulih
1.4.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	89,53	114,78	1. Kompetensi pelayanan yang sudah meningkat; 2. Digitalisasi Sistem pelayanan yang sangat membantu	
1.4.1.1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	90	93	103,33	1. Sarana dan Prasarana DPMPSTSP Kota Prabumulih sudah dalam Kategori Baik 2. Kompetensi pelayanan yang sudah meningkat 3. Digitalisasi Sistem pelayanan yang sangat membantu	

1.4.2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	B (>60-70)	B (60,86)	100	1. Komitmen pimpinan dalam pembangunan Zonasi Integritas 2. Penerapan Mitigasi Resiko Integritas 3. Evaluasi Pembangunan Zonasi Integritas secara berkala
1.4.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB (>70-80)	BB (74,81)	100	1. Penerapan Mitigasi Resiko Integritas dalam pengelolaan keuangan dan BMD serta Evaluasi penatausahaan keuangan
		Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan	100	100	100	1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMD 2. Evaluasi penatausahaan keuangan secara berkala

Sumber: Renstra DPMPPTSP Tahun 2024-2026

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Indikator Anggaran			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Prabumulih	4	-70,92	-1773	569.200.000	555.164.250	97,53	-1870,53
1.1.1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN	175	Rp109,73 Milyar	62,70	569.200.000	555.164.250	97,53	-34,83
1.4.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	78	89,53	114,78	25.000.000	24.999.212	100	14,79
1.4.1.1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	90	93	103,33	25.000.000	24.999.212	100	3,34
1.4.2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	B (>60-70)	B (60,86)	100	7.896.102.277	7.711.425.609	100	0
1.4.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB (>70-80)	BB (74,81)	100	7.775.522.277	7.591.449.609	100	0
		100%	100%	100	120.580.000	119.976.000	99	0,50

Sumber: Renstra DPMPPTSP Tahun 2024-2026

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 DPMPSTSP Kota Prabumulih, Indikator Sasaran terdiri dari 4 (empat), yaitu:

1. Indikator Sasaran Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang memiliki tingkat inefisien sebesar -34,83% hal ini menunjukkan bahwa capaian yang sangat rendah belum melebihi target yang ditetapkan, karena nilai realisasi investasi mengalami penurunan pada tahun 2024;
2. Indikator Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang memiliki tingkat efisien tinggi sebesar 3,34% dan sudah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan tingkat capaian yang masuk kategori sangat tinggi, serta pemanfaatan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana pelayanan DPMPSTSP Kota Prabumulih;
3. Indikator Sasaran Nilai SAKIP OPD sudah memiliki tingkat efisien impas sebesar 0% dan sudah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan tingkat capaian yang masuk kategori sangat tinggi, serta pemanfaatan anggaran untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pegawai DPMPSTSP Kota Prabumulih;
4. Indikator Sasaran Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan sudah memiliki tingkat efisien impas sebesar 0% dan sudah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan tingkat capaian yang masuk kategori sangat tinggi, serta pemanfaatan anggaran untuk peningkatan pengelolaan keuangan dan barang milih daerah (BMD) DPMPSTSP Kota Prabumulih.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Prabumulih	Tingkat Pertumbuhan Investasi	0	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Peluang Investasi Daerah yang Potensial	100%	Menunjang	Iklim investsai yang kondusif Menjamin keamanan dan kenyamanan berinvestasi

				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peluang Investasi Kota Prabumulih	100%	Menunjang	Menarik investor untuk berinvestasi di kota Prabumulih
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal	100%	Menunjang	Mengenalkan potensi dan peluang investasi di kota Prabumulih
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal	100%	Menunjang	Mengenalkan potensi dan peluang investasi di kota Prabumulih
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Kegiatan Usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	100%	Menunjang	Pembinaan dan pendampingan agar investor paham dan taat pada peraturan per Undang-Undangan
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	100%	Menunjang	
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Perizinan dan Penanaman Modal	100%	Menunjang	Kemudahan mendapat layanan
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi di Kota Prabumulih	100%	Menunjang	Data dan hasil analisisnya dapat dipergunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan
1.1.1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	62,70	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Peluang Investasi Daerah yang Potensial	100%	Menunjang	Iklim investsai yang kondusif Menjamin keamanan dan kenyamanan Berinvestasi
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peluang Investasi Kota Prabumulih	100%	Menunjang	Menarik investor untuk berinvestasi di kota Prabumulih
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal	100%	Menunjang	Mengenalkan potensi dan peluang investasi di kota Prabumulih
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal	100%	Menunjang	Mengenalkan potensi dan peluang investasi di kota Prabumulih
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Kegiatan Usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	100%	Menunjang	Pembinaan dan pendampingan agar investor paham dan taat pada peraturan per Undang-Undangan
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	100%	Menunjang	
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Perizinan dan Penanaman Modal	100%	Menunjang	Kemudahan mendapat layanan
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi di Kota Prabumulih	100%	Menunjang	Data dan hasil analisisnya dapat dipergunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan
1.4.1	Meningkatnya Kualitas	Indeks Kepuasan	114,78	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelayanan Penanaman Modal	100%	Menunjang	Meningkatkan Kepuasan

	Pelayanan Publik	Masyarakat		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu	100%	Menunjang	Masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang sesuai dengan SOP
1.4.1.1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	103,33	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelayanan Penanaman Modal	100%	Menunjang	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang sesuai dengan SOP
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu	100%	Menunjang	
1.4.2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	Menunjang	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Anggaran telah mengacu dokumen perencanaan • Pelayanan administrasi keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Layanan kepegawaian telah mencakup seluruh pegawai DPMTSP Kota Prabumulih • Layanan administrasi umum telah didukung dengan pengarsipan yang Baik • Pemeliharaan sarana dan prasarana dinas telah dilaksanakan secara optimal • Layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara optimal
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu	100%	Menunjang	Penyusunan Anggaran telah mengacu dokumen perencanaan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan disampaikan Tepat waktu	100%	Menunjang	Pelayanan administrasi keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen BMD yang disampaikan tepat waktu	100%	Menunjang	Pelayanan administrasi BMD sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi umum Perkantoran	100%	Menunjang	Layanan administrasi umum telah didukung dengan pengarsipan yang baik
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	100%	Menunjang	Pengadaan sarana dan prasarana dinas telah dilaksanakan secara optimal

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang	Layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara optimal
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD	100%	Menunjang	Pemeliharaan sarana dan prasarana dinas telah dilaksanakan secara optimal
1.4.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	Menunjang	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Anggaran telah mengacu dokumen perencanaan • Layanan administrasi umum telah didukung dengan pengarsipan yang Baik • Pemeliharaan sarana dan prasarana dinas telah dilaksanakan secara optimal • Layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara optimal
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu	100%	Menunjang	Penyusunan Anggaran telah mengacu dokumen perencanaan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi umum Perkantoran	100%	Menunjang	Layanan administrasi umum telah didukung dengan pengarsipan yang baik
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	100%	Menunjang	Pengadaan sarana dan prasarana dinas telah dilaksanakan secara optimal
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang	Layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara optimal
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD	100%	Menunjang	Pemeliharaan sarana dan prasarana dinas telah dilaksanakan secara optimal
		Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	Menunjang	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan administrasi keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Layanan kepegawaian telah mencakup seluruh pegawai DPMPSTP Kota Prabumulih
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan disampaikan Tepat waktu	100%	Menunjang	Pelayanan administrasi keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan

								ketentuan yang berlaku
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase dokumen BMD yang disampaikan tepat waktu	100%	Menunjang	Pelayanan administrasi BMD sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sumber: Perjanjian Kinerja dan Cascading Kinerja DPMPSTP Kota Prabumulih 2024

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan dapat dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:

A. TUJUAN STRATEGIS

1. Tujuan Strategis Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Prabumulih dengan Indikator Tujuan Tingkat Pertumbuhan Investasi yang memiliki beberapa Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, meliputi:

a. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

b. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

c. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

d. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jika dirata-rata capaian 4 (empat) program tersebut adalah sebesar 100%, masuk dalam kategori berhasil (sangat tinggi). Demikian pula rata-rata capain 4 (empat) kegiatan pendukung program adalah sebesar 100%, masuk dalam kategori berhasil (sangat tinggi). Sehingga 4 (empat) program dan 4 (empat) kegiatan tersebut mendukung dalam tujuan 1 “Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal”.

2. Tujuan Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat yang memiliki beberapa

Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, meliputi:

a. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Jika dirata-rata capaian 1 (satu) program tersebut adalah sebesar 100%, masuk dalam kategori berhasil (sangat tinggi). Demikian pula rata-rata capain 1 (satu) kegiatan pendukung program adalah sebesar 100%, masuk dalam kategori berhasil (sangat tinggi). Sehingga 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan tersebut mendukung dalam tujuan 2 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

3. Tujuan Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Pemerintahan dengan Indikator Tujuan Nilai SAKIP Kota yang memiliki beberapa Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, meliputi:

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jika dirata-rata capaian 1 (satu) program tersebut adalah sebesar 100%, masuk dalam kategori berhasil (sangat tinggi). Demikian pula rata-rata capain 7 (tujuh) kegiatan pendukung program adalah sebesar 100%, masuk dalam kategori berhasil (sangat tinggi). Sehingga 1 (satu) program dan 7 (tujuh) kegiatan tersebut mendukung dalam tujuan 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Pemerintahan”.

B. SASARAN STRATEGIS

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN dengan Indikator Sasaran Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang memiliki beberapa Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, meliputi:

a. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

b. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

c. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

d. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jika dirata-rata capaian 4 (empat) program tersebut adalah sebesar 100%, masuk dalam kategori berhasil (sangat tinggi). Demikian pula rata-rata capain 4 (empat) kegiatan pendukung program adalah sebesar 100%, masuk dalam kategori berhasil (sangat tinggi). Sehingga 4 (empat) program dan 4 (empat) kegiatan tersebut mendukung dalam sasaran 1 “Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN”.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Indikator Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang memiliki beberapa Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, meliputi:

a. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Jika dirata-rata capaian 1 (satu) program tersebut adalah sebesar 100%, masuk dalam kategori berhasil (sangat tinggi). Demikian pula rata-rata capaian 1 (satu) kegiatan pendukung program adalah sebesar 100%, masuk dalam kategori berhasil (sangat tinggi). Sehingga 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan tersebut mendukung dalam sasaran 2 “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan”.

3. Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Sasaran Nilai SAKIP OPD yang memiliki beberapa Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, meliputi:

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jika dirata-rata capaian 1 (satu) program tersebut adalah sebesar 100%, masuk dalam kategori berhasil (sangat tinggi). Demikian pula rata-rata capaian 5 (lima) kegiatan pendukung program adalah sebesar 100%, masuk dalam kategori berhasil (sangat tinggi). Sehingga 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan tersebut mendukung dalam sasaran 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”.

4. Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Sasaran Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan yang memiliki beberapa Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, meliputi:

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Jika dirata-rata capaian 1 (satu) program tersebut adalah sebesar 100%, masuk dalam kategori berhasil (sangat tinggi). Demikian pula rata-rata capain 2 (dua) kegiatan pendukung program adalah sebesar 100%, masuk dalam kategori berhasil (sangat tinggi). Sehingga 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan tersebut mendukung dalam sasaran 4 “Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan”.

3.2 Realisasi Anggaran

Perubahan postur anggaran DPMPSTSP Kota Prabumulih TA 2024 tidak mengalami banyak perubahan hanya mengalami sedikit penambahan anggaran pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disusun pada Rencana Kerja TA 2024. Penambahan anggaran belanja operasi dan belanja Modal dalam APBD Perubahan TA 2024 ini dikarenakan kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan serta peningkatan investasi penanaman modal di Kota Prabumulih. Pada pagu anggaran perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) TA 2024 mempunyai 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp7.336.176.868,-** yang terdiri dari Belanja Pegawai **Rp6.151.256.868,-**; Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp1.184.920.000,-**.

Dalam pelaksanaannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun 2024 mengalami Perubahan Anggaran hingga terjadi penambahan anggaran sehingga pada APBD - Perubahan dan APBD TA 2024 yang terdiri dari 6 (enam) program, 12 (tiga belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp8.490.302.277,-** yang terdiri dari Belanja Pegawai **Rp7.075.382.277,-**; Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp1.364.920.000,-** dan Belanja Modal **Rp50.000.000,-**.

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.490.302.277	8.291.589.071	97,66
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.896.102.277	7.711.425.609	97,66
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	11.600.000	96,67
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	2.950.000	98,33
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	1.950.000	97,50
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	1.950.000	97,50
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	2.950.000	98,33
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.800.000	90
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.081.882.277	6.913.941.994	97,63
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.022.102.277	6.854.165.994	97,61
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.780.000	53.776.000	99,99
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	100
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.000.000	3.000.000	100
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.800.000	60.200.000	99,01
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.800.000	10.800.000	100
1.3.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	49.400.000	98,80
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.420.000	358.820.594	99,56
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.975.000	99,50
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	4.998.500	99,97
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	19.991.500	99,96
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	29.966.850	99,89
1.4.5	Penyediaan Bahan/Material	45.420.000	45.415.500	99,99
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.000.000	253.473.244	99,40
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	49.550.000	99,10

1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	49.550.000	99,10
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.000.000	106.295.919	89,32
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.220.000	1.220.000	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	77.295.919	85,88
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.280.000	10.280.000	100
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.500.000	17.500.000	100
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.000.000	211.017.102	99,54
1.7.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	135.000.000	135.000.000	100
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.000.000	76.017.102	98,72
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100.000.000	100.000.000	100
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100.000.000	100.000.000	100
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	10.000.000	9.646.500	96,47
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.646.500	96,47
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.646.500	96,47
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	25.000.000	24.999.212	100
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	25.000.000	24.999.212	100
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20.000.000	19.999.212	100
4.1.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	5.000.000	5.000.000	100
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	438.200.000	424.517.750	96,88
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	438.200.000	424.517.750	96,88
5.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	108.194.000	102.367.000	94,61
5.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	213.534.000	209.025.750	97,89
5.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	116.472.000	113.125.000	97,13
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	21.000.000	21.000.000	100
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.000.000	21.000.000	100
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21.000.000	21.000.000	100

Sumber: DPA Perubahan dan Laporan Keuangan DPMPSTP Kota Prabumulih 2024

Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) TA 2024 ditetapkan sebesar Rp7.336.176.868,-. Dalam pelaksanaannya, belanja operasi dan belanja modal pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) TA 2024 mengalami perubahan anggaran hingga menjadi Rp8.490.302.277,-. Perubahan anggaran belanja operasi dan belanja modal dalam DPA-OPD Perubahan TA 2024 terjadi penambahan anggaran sebesar Rp1.154.125.409,- atau sebesar 13,59%. Realisasi anggaran belanja DPMPTSP Kota Prabumulih TA 2024 sebesar Rp8.291.589.071,- atau 97,66 % dari anggarannya. Untuk realisasi anggaran, hampir seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah mencapai 100% dari ke 6 (enam) program, 12 (tiga belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2024 jika dilihat dari capaian kinerja melalui realisasi keuangan sudah sudah di atas 96%.

Dalam pencapaian sasaran strategis DPMPTSP Kota Prabumulih, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu:

1. Data Internal

Data internal berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya;

2. Data Eksternal

Data eksternal digunakan sepanjang data tersebut relevan dengan pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih.

Adapun jenis indikator yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan DPMPTSP Kota Prabumulih adalah indikator masukan (*input*) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Dalam hal ini indikator input yang dimaksud adalah penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBD Kota Prabumulih 2024. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah unit usaha dalam hal ini jumlah PMDN dan jumlah investasi yang ditanamkan dalam PMDN di kota Prabumulih. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka panjang menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%).

Pengukuran kinerja mencakup pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan, sehingga pencapaian pengukuran kinerja dimaksud akan dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja, dengan tetap berpedoman pada dokumen Penetapan Kinerja dan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024.

Berdasarkan penyajian dalam form Pengukuran Kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang optimal atas sasaran-sasaran strategisnya. Pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 menunjukkan sudah berjalannya sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan pada Tahun 2024.

Analisis dan evaluasi capaian sasaran kinerja secara mandiri yang menggambarkan kualitas capaian (*output*) maupun hasil (*outcome*) pada pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024 mempunyai 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

Tujuan:

- a. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Prabumulih;
- b. Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kota Prabumulih.

Sasaran:

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih;
- b. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. Meningkatnya Realisasi Investasi.

Sejumlah permasalahan dalam Perizinan dan Penanaman Modal yang senantiasa berkembang menjadi tantangan bagi DPMPTSP Kota Prabumulih dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Melihat pada peluang dan tantangan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Prabumulih dirasa perlu diupayakan untuk memperkuat peran kelembagaan DPMPTSP Kota Prabumulih dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang baik dari administrasi pelayanan maupun peningkatan kualitas pelayanan langsung terhadap masyarakat;
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Melalui Perizinan dan Non Perizinan;
- Meningkatkan citra ASN DPMPTSP Kota Prabumulih dengan memberikan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, aman, transparan, dan sesuai SOP;
- Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Perizinan dan Non Perizinan;

- Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pengurusan Perizinan.

Langkah-langkah antisipasi dan upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang, strategi pemecahan masalah yang perlu dilakukan akan melalui rapat koordinasi dengan OPD terkait dan kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana di tahun 2024 akan dipertimbangkan kembali untuk dapat dianggarkan pada tahun berikutnya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2024-2026




**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DPMPTSP KOTA PRABUMULIH**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH**

Kota : Prabumulih
 Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih
 Tugas : Melaksanakan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal serta Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 Fungsi : Perumus, Penyederhanaan, Pengembangan, Pengkoordinasi, Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Penanaman Modal serta Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

No	Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih	1. Nilai SAKIP OPD	SAKIP LAKIP LAPORAN KEUANGAN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Berupa Peringkat/Predikat dalam Mengidentifikasi kemampuan OPD perihal merencanakan, menyelaraskan dan melaporkan capaian kinerja.
		2. Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan		
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM = Nilai Indeks x Nilai Dasar SKM (25)
3.	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)	Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online Kota Prabumulih	Realisasi Investasin Tahun N / Target Investasi Tahun N x 100

Prabumulih, Januari 2023

KERALA DINAS,

 A. Zahedi, S.Pd., MM
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196305011988031005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Prabumulih**





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Muhammad Ali, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Elman, ST., MM

Jabatan : Pj. Walikota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. Walikota Prabumulih,

H. Elman, ST., MM

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. Muhammad Ali, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660412 199312 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP OPD	A
		- Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	90
3	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	50 Milyar
		Jumlah Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	125 Milyar

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 100.000.000	
2. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 10.000.000	
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 25.000.000	
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 438.200.000	
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 10.500.000	
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.752.476.868	

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
 Pj. Walikota Prabumulih

H. Elman, ST., MM

Pihak Pertama,
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. Muhammad Ali, M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19660412 199312 1 001



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251

website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Choiriah, SE., M.Si

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Muhammad Ali, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. Muhammad Ali, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660412 199312 1 001

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan

Choiriah, SE., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19780927 200312 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Pelaku Perizinan yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rasio Pelayanan Perizinan $\frac{\text{Jumlah Izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah pemohon pelayanan perizinan}}$	90 %

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 20.000.000	

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. H. Muhammad Ali, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660412 199312 1 001

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan



Choiriah, SE., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19780927 200312 2 007



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251

website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariani, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Dan Sistem Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Muhammad Ali, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. Muhammad Ali, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660412 199312 1 001

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan
Sistem Informasi Penanaman Modal

Ariani, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19730518 200604 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	100 %
1.2	Tersedianya Data dan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah Dokumen Penanaman Modal dan Perizinan yang Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp. 108.194.000	
1.2 Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Rp. 213.534.000	
1.3 Pengawasan Penanaman Modal	Rp. 116.472.000	
2. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
2.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 10.500.000	

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. H. Muhammad Ali, M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19660412 199312 1 001

Pihak Pertama,
 Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal



Ariani, SE
 Penata Tingkat I, III/d
 NIP. 19730518 200604 2 001



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251

website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Yurita, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Muhammad Ali, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. Muhammad Ali, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660412 199312 1 001

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan

Yuli Yurita, SE
Pembina, IV/a
NIP. 19740714 200501 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Terselesainya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Rasio Pengaduan Perizinan $\frac{\text{(Jumlah Masyarakat yang diselesaikan)}}{\text{Jumlah Pengaduan}}$	100 %
1.2	Terlaksananya Kegiatan Audit Eksternal ISO 9001:2015	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Audit Eksternal ISO 9001:2015	1 Sertifikat

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 30.000.000	
2. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
2.1 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp. 5.000.000	

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. Muhammad Ali, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660412 199312 1 001

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan

Yuli Yurita, SE
Pembina, IV/a
NIP. 19740714 200501 2 005



PERMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251
website : dpmpstsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmpstsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riko Prayudi Septa, SE., M.Si

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPSTSP Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Muhammad Ali, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. Muhammad Ali, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660412 199312 1 001

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Iklim Penanaman Modal

Riko Prayudi Septa, SE., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19810911 201001 1 021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Tersedianya Dokumen Peluang Investasi Daerah yang Potensial	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Usaha, Perencanaan Penanaman Modal dan Deregulasi Penanaman Modal	8 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
1.1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp. 100.000.000	

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. H. Muhammad Ali, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660412 199312 1 001

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Iklim Penanaman Modal



Riko Prayudi Septa, SE., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19810911 201001 1 021



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251
website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Purwati, SE., M.Si

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Promosi Penanaman Modal
DPMPTSP Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Muhammad Ali, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. Muhammad Ali, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660412 199312 1 001

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Promosi Penanaman Modal

Sri Purwati, SE., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19770612 200904 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Meningkatnya Minat Investor di Kota Prabumulih	Jumlah Investor Baru	2

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.000.000	

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. H. Muhammad Ali, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660412 199312 1 001

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Promosi Penanaman Modal



Sri Purwati, SE., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19770612 200904 2 007



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur

Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251

website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dessy Dian Syari, S.Si., M.Si

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Program dan Pelaporan
DPMPTSP Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Muhammad Ali, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. Muhammad Ali, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660412 199312 1 001

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Program dan Pelaporan

Dessy Dian Syari, S.Si., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19830508 201001 2 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	5 Dokumen

Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. H. Muhammad Ali, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660412 199312 1 001

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Program dan Pelaporan



Dessy Dian Syari, S.Si., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19830508 201001 2 019



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251
website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andesta Faramita, SE., MM

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Muhammad Ali, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. Muhammad Ali, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660412 199312 1 001

Pihak Pertama,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Andesta Faramita, SE., MM
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19761211 200903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen BMD yang disampaikan tepat waktu	1 Dokumen
1.2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi umum Perkantoran	100 %
1.3	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen
1.4	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	2 Item

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 10.800.000
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.000.000
	2.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 5.000.000
	2.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 20.000.000
	2.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 30.000.000
	2.5 Penyediaan Bahan/Material	Rp 45.420.000
	2.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 165.000.000
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.220.000
	3.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 90.000.000

	3.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	10.280.000
4.	4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	70.000.000
	4.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	100.000.000

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. H. Muhammad Ali, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660412 199312 1 001

Pihak Pertama,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian



Andesta Faramita, SE., MM
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19761211 200903 2 001



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251
website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Olyvianti, ST., MM

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Keuangan DPMPSTSP
Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Muhammad Ali, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. Muhammad Ali, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660412 199312 1 001

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Keuangan

Novita Olyvianti, ST., MM
Pembina IV/a
NIP. 19771103 200501 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Terlaksananya Administrasi Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan disampaikan Tepat waktu	4 Dokumen

Kegiatan

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. Muhammad Ali, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660412 199312 1 001

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Keuangan

Novita Glyvianti, ST., MM
Pembina, IV/a
NIP. 19771103 200501 2 005



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251
website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mart Rubianto, SE., M.Si

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perdagangan, Industri dan Pariwisata

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Choiriah, SE., M.Si

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPPTSP Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan

Choiriah, SE., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19780927 200312 2 007

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Perdagangan, Industri
dan Pariwisata

Mart Rubianto, SE., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19760305 200003 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Pelaku Perizinan yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Aplikasi OSS, SiCantik Cloud dan SIMBG)	Jumlah Izin yang diterbitkan	800 Izin

Kegiatan

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan



Choiriah, SE., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19780927 200312 2 007

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Perdagangan, Industri
dan Pariwisata



Mart Rubianto, SE., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19760305 200003 1 004



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251
website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferli Yanto, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Profesi dan Kesehatan DPMPTSP Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Choiriah, SE., M.Si

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan


Choiriah, SE., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19780927 200312 2 007

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Profesi dan Kesehatan


Ferli Yanto, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19810706 200312 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Pelaku Perizinan yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Aplikasi OSS dan SiCantik Cloud)	Jumlah Izin yang diterbitkan	1200 Izin

Kegiatan

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan


Choiriah, SE., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19780927 200312 2 007

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Profesi dan Kesehatan


Ferli Yanto, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19810706 200312 1 001



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur

Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251

website : dpmpstsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmpstsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wenny Lestari, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan dan Lingkungan DPMPTSP Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Choiriah, SE., M.Si

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan

Choiriah, SE., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19780927 200312 2 007

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Pembangunan dan
Lingkungan

Wenny Lestari, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19821003 201001 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Pelaku Perizinan yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Aplikasi OSS, SiCantik Cloud dan SIMBG)	Jumlah Izin yang diterbitkan	700 Izin

Kegiatan

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan



Choiriah, SE., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19780927 200312 2 007

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Pembangunan dan
Lingkungan



Wenny Lestari, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19821003 201001 2 012



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251
website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudia Ersi, SP

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ariani, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan
Sistem Informasi Penanaman Modal

Ariani, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19730518 200604 2 001

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pemantauan dan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman
Modal

Yudia Ersi, SP
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19791104 200604 2 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inpeksi Lapangan Serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	12 Kegiatan Usaha

Kegiatan

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
- 1.2 Pengawasan Penanaman Modal

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan
Sistem Informasi Penanaman Modal



Ariani, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19730518 200604 2 001

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pemantauan dan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman
Modal



Yudha Ersi, SP
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19791104 200604 2 019



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251
website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmarani, Am.Kep

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pembinaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ariani, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan
Sistem Informasi Penanaman Modal

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pembinaan dan
Pelaksanaan Penanaman Modal

Ariani, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19730518 200604 2 001

Asmarani, Am.Kep
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19811207 200312 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	185 Pelaku Usaha

Kegiatan

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1.1 Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan
Sistem Informasi Penanaman Modal



Ariani, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19730518 200604 2 001

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pembinaan dan
Pelaksanaan Penanaman Modal



Asmarani, Am.Kep
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19811207 200312 2 005



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251
website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Irawan, SKM., M.Si

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ariani, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan
Sistem Informasi Penanaman Modal

Ariani, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19730518 200604 2 001

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pengolahan Data dan
Informasi Penanaman Modal

Bambang Irawan, SKM., M.Si
Penata, III/c
NIP. 19810224 201001 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Realisasi Investasi Kota Prabumulih	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Realisasi Investasi Kota Prabumulih	3 Dokumen

Kegiatan

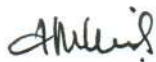
1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan
Sistem Informasi Penanaman Modal



Ariani, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19730518 200604 2 001

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pengolahan Data dan
Informasi Penanaman Modal



Bambang Irawan, SKM., M.Si
Penata, III/c
NIP. 19810224 201001 1 011



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251

website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monica Tri Putri, SH

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan DPMPTSP Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yuli Yurita, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan

Yuli Yurita, SE
Pembina, IV/a
NIP. 19740714 200501 2 005

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pelaporan dan
Peningkatan Layanan

Monica Tri Putri, SH
Penata, III/c
NIP. 19900304 201503 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat	4 Dokumen

Kegiatan

Sub Kegiatan

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan



Yuli Yurita, SE
Pembina, IV/a
NIP. 19740714 200501 2 005

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pelaporan dan
Peningkatan Layanan



Monica Tri Putri, SH
Penata, III/c
NIP. 19900304 201503 2 006



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251
website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ninik Sugjati, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan DPMPTSP Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yuli Yurita, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan

Yuli Yurita, SE
Pembina, IV/a
NIP. 19740714 200501 2 005

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pengaduan dan
Informasi Layanan

Ninik Sugjati, SE
Penata, III/c
NIP. 19770415 200604 2 026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25 Orang

Kegiatan

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1.1 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan



Yuli Yurita, SE
Pembina, IV/a
NIP. 19740714 200501 2 005

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pengaduan dan
Informasi Layanan



Ninik Sugiati, SE
Penata, III/c
NIP. 19770415 200604 2 026



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur

Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251

website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hardinawati, SP

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan DPMPTSP Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yuli Yurita, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan

Yuli Yurita, SE
Pembina, IV/a
NIP. 19740714 200501 2 005

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Kebijakan dan
Advokasi Layanan

Hardinawati, SP
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19841007 201001 2 029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Terlaksananya Kegiatan Audit Eksternal ISO 9001:2015	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Audit Eksternal ISO 9001:2015	1 Sertifikat

Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

- 1.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan



Yuli Yurita, SE
Pembina, IV/a
NIP. 19740714 200501 2 005

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Kebijakan dan
Advokasi Layanan



Hardinawati, SP
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19841007 201001 2 029



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251

website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Apriani, ST., M.Si

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Deregulasi Penanaman Modal DPMPTSP Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Riko Prayudi Septa, SE., M.Si

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Kota Prabumulih


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Iklim Penanaman Modal


Riko Prayudi Septa, SE., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19810911 201001 1 021

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Deregulasi Penanaman
Modal


Apriani, ST., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19800201 200502 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2024


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Tersedianya Dokumen Peraturan/Deregulasi Penanaman Modal tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi Tahun 2024	Jumlah Dokumen Draft Peraturan/Deregulasi Penanaman Modal tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi	1 Dokumen
1.2	Tersedianya Dokumen Naskah Akademik Peraturan/Deregulasi Penanaman Modal tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi Tahun 2024	Jumlah Dokumen Naskah Akademik Peraturan/Deregulasi Penanaman Modal tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi Tahun 2024	1 Dokumen

Kegiatan

Sub Kegiatan

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Iklim Penanaman Modal


Riko Prayudi Septa, SE., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19810911 201001 1 021

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Deregulasi Penanaman
Modal


Apriani, ST., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19800201 200502 2 005



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251

website : dpmtsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmtsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afriyani, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Perencanaan Penanaman Modal DPMTSP Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Riko Prayudi Septa, SE., M.Si

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMTSP Kota Prabumulih


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Iklim Penanaman Modal


Riko Prayudi Septa, SE., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19810911 201001 1 021

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Perencanaan
Penanaman Modal


Afriyani, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19800419 200701 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Tersedianya Dokumen Data Potensi Investasi Regional (PIR)	Jumlah Dokumen Data Laporan Potensi Investasi Regional (PIR)	1 Dokumen
1.2	Tersedianya Dokumen Peluang Investasi Daerah	Jumlah Dokumen Draft Pembuatan Rencana Umum Pembuatan Modal (RUPM)	1 Dokumen
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kemudahan Perizinan Penanaman Modal Kepada Investor yang masuk	1 Dokumen

Kegiatan

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1.1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Iklim Penanaman Modal



Riko Prayudi Septa, SE., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19810911 201001 1 021

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Perencanaan
Penanaman Modal



Afriyani, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19800419 200701 2 007



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251

website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reki Saputra, SH., M.Si

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pemberdayaan Usaha
Penanaman Modal DPMPTSP Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Riko Prayudi Septa, SE., M.Si

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Iklim Penanaman Modal

Riko Prayudi Septa, SE., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19810911 201001 1 021

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pemberdayaan Usaha
Penanaman Modal

Reki Saputra, SH., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19840228 200701 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Tersedianya Dokumen UMKM Potensial	Jumlah Data UMKM Kemitraan	1 Dokumen
1.2	Tersedianya Dokumen Monitoring UMKM	Jumlah Dokumen UMKM Pembuatan Profil	1 Dokumen
1.3	Tersedianya Dokumen UMKM FGD	Jumlah Data UMKM yang siap dimitrakan	1 Dokumen

Kegiatan

Sub Kegiatan

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Iklim Penanaman Modal


Riko Prayudi Septa, SE., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19810911 201001 1 021

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pemberdayaan Usaha
Penanaman Modal


Reki Saputra, SH., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19840228 200701 1 003



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251
website : dpmtsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmtsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ahmad Widiatoro, SE., M.Si

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Sarana dan Prasarana
Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sri Purwati, SE., M.Si

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Promosi Penanaman Modal
DPMPTSP Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Promosi Penanaman Modal

Sri Purwati, SE., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19770612 200904 2 007

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Sarana dan Prasarana
Promosi Penanaman Modal

Nur Ahmad Widiatoro, SE., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19770521 200604 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Tersedianya Video Profil Investasi Kota Prabumulih Sebagai Salah Satu Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Video Publikasi Profil Investasi Kota Prabumulih	1 Video Profil Investasi

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

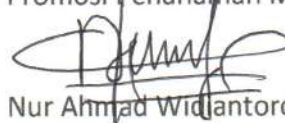
Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Promosi Penanaman Modal



Sri Purwati, SE., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19770612 200904 2 007

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Sarana dan Prasarana
Promosi Penanaman Modal



Nur Ahmad Widjantoro, SE., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19770521 200604 1 009



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251

website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Saputra, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pelaksana Promosi
Penanaman Modal DPMPTSP Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sri Purwati, SE., M.Si

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Promosi Penanaman Modal
DPMPTSP Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Promosi Penanaman Modal

Sri Purwati, SE., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19770612 200904 2 007

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pelaksana Promosi
Penanaman Modal

Eko Saputra, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19860411 200801 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Tersedianya Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Kota Prabumulih	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal Kota Prabumulih	1 Dokumen
1.2	Tersedianya Dokumen Data UMKM Kota Prabumulih Tahun 2024 yang siap dipromosikan	Jumlah Dokumen Data UMKM Kota Prabumulih Tahun 2024 yang siap dipromosikan	1 Dokumen UMKM Tahun 2024 yang siap dipromosikan

Kegiatan

Sub Kegiatan

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Promosi Penanaman Modal



Sri Purwati, SE., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19770612 200904 2 007

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pelaksana Promosi
Penanaman Modal



Eko Saputra, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19860411 200801 1 001



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251
website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Surya Putri, S.Psi., M.Si

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pengembangan Promosi
Penanaman Modal DPMPTSP Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sri Purwati, SE., M.Si

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Promosi Penanaman Modal
DPMPTSP Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Promosi Penanaman Modal

Sri Purwati, SE., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19770612 200904 2 007

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pengembangan
Promosi Penanaman Modal

Ade Surya Putri, S.Psi., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19870122 201101 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Tersedianya Dokumen Potensi Pariwisata Kota Prabumulih	Jumlah Dokumen Potensi Pariwisata Kota Prabumulih	1 Dokumen
1.2	Tersedianya Kebijakan Strategis Pengembangan Potensi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kebijakan Strategis Pengembangan Potensi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen

Kegiatan

Sub Kegiatan

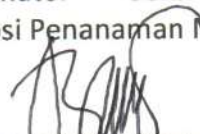
Pihak Kedua,
Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator
Bidang Promosi Penanaman Modal



Sri Purwati, SE., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19770612 200904 2 007

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Seksi Pengembangan
Promosi Penanaman Modal



Ade Surya Putri, S.Psi., M.Si
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19870122 201101 2 008

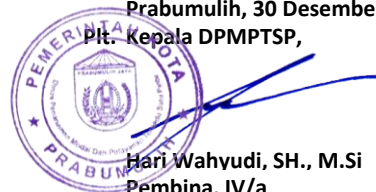
Pengukuran Kinerja Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	INDIKATOR	TOLAK UKUR PROGRAM / KEGIATAN	Penyediaan	Dana	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
				(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			8,490,302,277		8,291,589,071	97.66
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator sasaran kota yang tercapai		7,896,102,277		7,711,425,609	97.66
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12,000,000		11,600,000	96.67
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,000,000		2,950,000	98.33
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000		1,950,000	97.50
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000		1,950,000	97.50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3,000,000		2,950,000	98.33
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,000,000		1,800,000	90.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan disampaikan Tepat Waktu		7,081,882,277		6,913,941,994	97.63
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang / Bulan	7,022,102,277		6,854,165,994	97.61
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	53,780,000		53,776,000	99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,000,000		3,000,000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3,000,000		3,000,000	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen BMD yang disampaikan Tepat Waktu		60,800,000		60,200,000	99
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10,800,000		10,800,000	100
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50,000,000		49,400,000	98.80
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran		360,420,000		358,820,594	99
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	5,000,000		4,975,000	99
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5,000,000		4,998,500	99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000		19,991,500	99
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30,000,000		29,966,850	99
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	45,420,000		45,415,500	99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	255,000,000		253,473,244	99
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja yang tersedia		50,000,000		49,550,000	99
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50,000,000		49,550,000	99
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		119,000,000		106,295,919	89.32
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,220,000		1,220,000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	90,000,000		77,295,919	86
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	10,280,000		10,280,000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	17,500,000		17,500,000	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD yang terpenuhi		212,000,000		211,017,102	99.54
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	135,000,000		135,000,000	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	77,000,000		76,017,102	99
2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rasio Pelayanan Perizinan Rasio Pengaduan Perizinan		25,000,000		24,999,212	100
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rasio Pelayanan Perizinan Rasio Pengaduan Perizinan		25,000,000		24,999,212	100
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	300 Pelaku Usaha	20,000,000		19,999,212	100

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	INDIKATOR	TOLAK UKUR PROGRAM / KEGIATAN	Penyediaan Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12 Pelaku Usaha	5,000,000	5,000,000	100
3	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Peluang Investasi Daerah yang Potensial		100,000,000	100,000,000	100
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberian Keringanan Pajak dan Pemberian Kemudahan dalam Hal Pengurusan Izin Kepada Investor yang Masuk dengan syarat-syarat tertentu		100,000,000	100,000,000	100
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100
4	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal		10,000,000	9,646,500	96.47
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal		10,000,000	9,646,500	96.47
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10,000,000	9,646,500	96.47
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang dipantau, dibina dan diawasi		438,200,000	424,517,750	96.88
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang dipantau, dibina dan diawasi		438,200,000	424,517,750	96.88
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha	108,194,000	102,367,000	94.61
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	185 Pelaku Usaha	213,534,000	209,025,750	97.89
	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	12 Kegiatan Usaha	116,472,000	113,125,000	97.13
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Penanaman Modal dan Perizinan yang Terintegrasi Secara Elektronik		21,000,000	21,000,000	100
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha/Non Berusaha yang akurat		21,000,000	21,000,000	100
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1 Dokumen	21,000,000	21,000,000	100

Prabumulih, 30 Desember 2024

Pt. Kepala DPMPTSP,



Hari Wahyudi, SH., M.Si
Pembina, IV/a

NIP. 19811030 201101 1 001



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur

Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251

website : dpmpstsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmpstsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

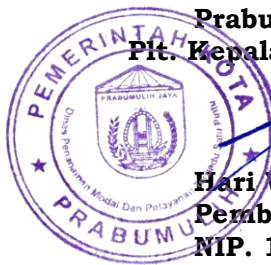
INVESTASI PENANAMAN MODAL DI KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Nilai Investasi (Rp.)
1	CINEMAXX GLOBAL PASIF..	MENARA M..	189,000,075.30
2	KALINGGA KARA DANESW..	Jl. Lingkar T.. Sumatera S..	25,500,010.20
3	PT PRIMA FAJAR (PMA)	RT 02 RW 05 (Prabumulih 1) kelurahan karang jaya kecamatan prabumulih Timur, Prabumulih Broiler 4 desa Jungai Kec. RKT, Broiler 5 Rambang Senuling, Komplek Du.. Sumatera S.. Kota Prabu..	5,129,887,334.90
4	PT KALINGGA MURDA (PMA)	Jl. Lingkar Timur RT.011/RW.001,	877,337,260.20
5	PT DAYA INDAH SEJAHTERA (PMA)	MR. DIY FS Ruko Sudirman Prabumulih (XBLH), Jl. Jend. Sudirman	800,000,000.00
6	PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSISCS NUSANTARA	Jl. Nigata Kota Prabumulih, Wisma Muli.. Sumatera S.. Kota Prabu, Jl. Nigata No. 14 Kota Prabumulih - Sumatera Selatan	9,565,160,566.00
7	PT SINAR NIAGA SEJAHTERA	Jl. Jend Sudirman, JL. WAHAB .. Sumatera S.. Kota Prabu..	69,582,525.00
1	AR-MUHAMAD	Jl. Angkata..	2,000,000,000
2	BAKTI TIMAH SOLUSI MEDIKA	JALAN SANGUL DE..	239,800,000
3	BAKTI TIMAH SOLUSI MEDIKA	JALAN SAN..	675,000,000
4	BRYLIAN INDAH	JL. DEMPO	464,000,000
5	CIPTA KARYA BARU	JL. JEND.SUDIRMAN	72,500,000
6	DAYA ANUGRAH MANDIRI	JL. Soekarn..	30,200,000
7	DAYA INDAH YASA	KAWASAN ..	3,400,000
8	FADHILAH MEDIKA CENTR..	JL.JEND.SU..	500,000,000
9	INDO CHALAN PERKASA	Jalan Shinta	6,360,244,455
10	INDOMARCO PRISMATAMA	Jalan Ancol .. Sumatera S..	8,360,100,000
11	KURNIA RIZKI JAYA LESTARI	PRUMNAS Sumatera Kota	440,000,000
12	MAJU MOBILINDO	JL.KOL H.B.. Sumatera S.. Kota Prabu..	7,500,000
13	MATAHARI DEPARTMENT ..	Sopo Del Of.. Sumatera S.. Kota Prabu..	1,900,000
14	NIAGA INDOGUNA YASA	Office 8, Le.. Sumatera S.. Kota Prabu..	4,000,000
15	PERTAMINA BINA MEDIK..	JL. KYAI MA.. Sumatera S.. Kota Prabu..	145,500,000
16	PIONEERINDO GOURMET ..	JL. PALMER.. Sumatera S.. Kota Prabu..	8,000,000
17	RICHEESE KULINER INDO..	JL.SOEKAR.. Sumatera S.. Kota Prabu..	2,800,000,000
18	SAMUDRA MOTOR	JL. JEND. Sumatera Kota	600,000,000
19	SARANA BAJA INDO	Jl. Jend. Su.. Sumatera S.. Kota Prabu..	5,600,000
20	PT SUBUR SEDAYA MAJU (PMDN)	SOEKARNO .. Selatan Prabumulih, Jl. Pipa Pertamina Rt.001/ Rw.001, Kota Prabum	883,228,248
21	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	GEDUNG AL.. Sumatera S.. Kota Prabu..	5,894,800,000
22	SURGANYA MOTOR INDO..	Jalan Tole I.. Sumatera S.. Kota Prabu..	1,100,000
23	THAMRIN BROTHERS	JL. JEND. S.. Sumatera S.. Kota Prabu..	21,800,000

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Nilai Investasi (Rp.)
24	TIRTA SAMBAWA	JL. ARJUNA Sumatera Kota	295,900,000
25	TITIAN TIRTA SAMUDERA	JL. ARJUNA Sumatera S.. Kota Prabu..	15,000,000
26	PT INDO CHALAN PERKASA (PMDN)	Jalan Shinta Nomor 64, Rt.019 Rw.008 kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara	7,635,450,934
27	PT INDOMARCO PRISMATAMA (PMDN)	(IDM JENDSU 124 PRABUMULIH) JL. JENDRAL SUDIRMAN KEL. GUNUNG IBUL KEC. PRABUMULIH TIMUR	26,479,417,232
28	PT BINA MITRA ARTHA (PMDN)	Jl Jendral Sudirman, No. 45, Kota Prabumulih -	1,271,000,000
29	PT CIPTA KARYA BARU (PMDN)	Jl. Jend. Sudirman No. 192 Kota Prabumulih - Sumatera selatan	2,207,200,000
30	PT BISSOT JAYA PRATAMA (PMDN)	Jl. Rama No.109, Kota Prabumulih -	325,000,000
31	CV SAMUDRA MOTOR (PMDN)	Jl. Jenderal Sudirman No. 45 Kota Prabumulih	628,000,000
32	PT FAST FOOD INDONESIA (PMDN)	JL. JENDERAL SUDIRMAN, Kota Prabumulih	467,035,630
33	PT JAYA ANDALAS PRIMA (PMDN)	Jl. Letnan Munandar No. 673 LK 03	2,556,603,339
34	PT BRYLIAN INDAH (PMDN)	Jalan Dempo No. 357, Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur (sumsel 31114) Kota Prabumulih -	863,000,000
35	PT CINEMAXX GLOBAL PASIFIK (PMA)	Citimall Prabumulih Lt. 1 unit no. 1-0210, Jl. Lingkar Timur	1,460,491,688
36	PT KARYAJAYA DEDYMULIA (PMDN)	Jl. Letnan Munandar No. 673 , Kota Prabumulih	452,004,394
37	PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PMDN)	JL. KESEHATAN NO. 100 KOMPLEK PERTAMINA	764,345,200
38	PT PERTA-SAMTAN GAS (PMA)	Jl. Nigata RT. 02 RW. 02, Kota Prabumulih	142,529,764
39	PT KURNIA RIZKI JAYA LESTARI (PMDN)	Jalan Prumnas Vina Sejahtera Ii Blok Dc Nomor.04	495,000,000
40	PT TRIYASA PIRSA UTAMA (PMDN)	Jl. Jendral Sudirman No. 36 RT. 04 RW. 02,	76,644,157
41	PT MATAHARI PUTRA PRIMA (PMDN)	CitiMall Prabumulih, Jl. Lingkar Timur, Kota Prabumulih	108,043,683
42	PT LINTAS SUMATERA PERSADA (PMDN)	JALAN JAJUR PIPA PERTAMINA,	227,268,500
43	PT ASTRA INTERNATIONAL (PMDN)	Jl. Jend. Sudirman RT 01/08 , Kota Prabumulih	600,004,750
44	PT THAMRIN BROTHERS (PMDN)	Jl. Jend Sudirman RT. 004 RW. 005,	43,600,000
45	PT AMANAH LENTERA PERSADA (PMDN)	Jl. Jend. Sudirman Kota Prabumulih	11,100,000
46	T SUMBER ALFARIA TRIJAYA (PMDN)	(jensud 7 Prabu) jl. Jendral Sudirman Rt.02 Rw. 02, (alipatan) jl. Alipatan Ert. 27 Rw. 11 Kel. Mangga Besar, JL. KARTINI RT.02 RW.02 (JL. KARTINI) Kelurahan : Sukajadi Kecamatan : Prabumulih Timur, JL. KELEKAR RT.01 RW.02 (TALANG JIMAR) Kelurahan : Sukaraja Kecamatan : Prabumulih Selatan, Jl. Tenggamus Rt. 04 Rw. 05 Kota Prabumulih	2,752,414,328
47	PT MATAHARI DEPARTMENT STORE (PMDN)	159. MDS Citimall Prabumulih, Jl. Lingkar Timur, Kota Prabumulih	136,645,500
48	PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL (PMDN)	CFC CITIMALL PRABUMULIH Jl. Lingkar Timur, Kelurahan : Gunung Ibul Kecamatan : Prabumulih Timur	11,000,000
49	PT ASPIRASI HIDUP INDONESIA (PMDN)	Ace Prabumulih, Jl. Jend. Sudirman No. 14 Kelurahan : Muara Dua Kecamatan : Prabumulih Timur	2,383,000
50	PT DAYA ANUGRAH MANDIRI (PMDN)	Jl. Jendral Sudirman No.362 RT 01 RW 02 ,	51,476,771
51	INDOGUNA YASA	Citimall Prabumulih, Jl. Lingkar Timur, Kota Prabumulih	1,373,410
52	PT PANDAWA LIMA SUKSES SEJAHTERA (PMDN)	Jl. Sumatera Rt 02 Rw 01 Kota Prabumulih -	5,350,000,000
53	PT TITIS SAMPURNA (PMDN)	Jl.Pertamina Dusun 2, Kota Prabumulih	1,270,093,200
54	PT PRABU HULU ENERGY (PMDN)	Jl. Alipatan No. 508 Rt. 028 Rw. 012 Kota Prabumulih	437,500,000
55	PT GUMAY CAHAYA GEMILANG (PMDN)	Jl. Mayor Iskandar No.3403 Rt.09 Rw.04 Kota Prabumulih -	130,000,000
56	PT ADELLA KARYA UTAMA (PMDN)	Jl Bukit Lebar Perum Palembang Mutiara No. 14 & 15, Kota Prabumulih	175,000,000
57	PT SINARNIAGA SEJAHTERA (PMDN)	Jl. Jenderal Soedirman No. 03, Kota Prabumulih	61,678,681

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Nilai Investasi (Rp.)
58	PT NIAGA INDOGUNA YASA (PMDN)	Citimall Prabumulih Lantai GF G-0020 Gunung Ibul,	40,997,704
59	PT DAYA INDAH ANUGERAH (PMA)	MR. DIY Citimall Prabumulih (CPBM)	40,997,703
60	PT KALINGGA KARA DANESWARA (PMA)	Jalan Lingkar Rt 11 RW 1, Kota Prabumulih	28,993,780
61	PT KUALA DELI TRANS (PMDN)	Dusun Iii Desa Karang , Kec Rambak Kapak Tengah	48,000,000
62	PT DAYA INDAH YASA (PMDN)	R DIY Ruko A. Yani Prabujaya Prabumulih, Jln. Jenderal A Yan,	20,018,379
63	PT MAKMUR MANDIRI LESTARI (PMDN)	Jalan Padat Karya Kota Prabumulih	7,875,000
64	PT CATUR SENTOSA ADIPRIMA (PMDN)	PT. Catur Sentosa Adiprima (Cabang Prabumulih), Jl. Lingkar lintas timur rt 11 rw 1	7,446,500
65	PT VIDUO VI PRABU	Jl. Prof M. Yamin No. 827 Pasar II Prabumulih Utara	998,056,000
66	SAMPOERNA INDAH LESTARI	Jalan Sumatera	300,000,000
67	MATAHARI PUTRA PRIMA	Citimall Prabumulih, Lingkar Timur	74,575,000
68	PT. LINTAS SUMATERA PERSADA	Jl. Jalur Pipa Pertamina	51,195,000
69	JAYA ANDALAS PRIMA	JL. LETNAN ..	207,026,191
70	PT CINEMAXX GLOBAL PASIFIK	Citimal	1,137,414,098
71	PT PERTAMINA MEDIKA	Jl. Kesehatan Komp Pertamina	618,845,200
72	PT. BINA MITRA ARTHA	Jl. Jend Sudirman	250,000,000
73	PT NUSANTARA SURYA SAKTI	Jl. Jend Sudirman	160,793,357
74	CV JAYA PESONA ABADI	Jl. Raya Muara Enim	530,000,000
75	SOLMIDIN	Jl. Lintas Gn Kemala	400,000,000
76	PT PRAMITA BIOLAB INDONESIA	Jl. Lingkar Timur Prabumulih	273,278,000
77	PT. LINGKAR PRABUJAYA ENERGI	Jl. Gurati Prabujaya	200,000,000
78	PT PRABU SAKTI MANDRAGUNA	Jl. Karang Jaya	200,000,000
79	PT PUTRA MUDA PRABU	Jl. Sepatu Majasati	184,008,000
80	PT PUTRA GUNUNG MEGANG	Jl. Nusa Gn Ibul	157,063,000
81	PT DUTA NUSANTARA	jl. Jend Sudirman	50,000,000
82	CV TIRTA KENCANA	jl. Merak Prabujaya	55,300,000
83	PT ALAM KHARISMA BERSAUDARA	Jl Sumatera gg Anugrah	12,000,000
84	CV SEMESTA RAYA MANDIRI	Jl. Jend Sudirman	100,000
Jumlah			109,733,327,547.60

Prabumulih, 12 Februari 2025
Pit. Kepala DPMPSTP,



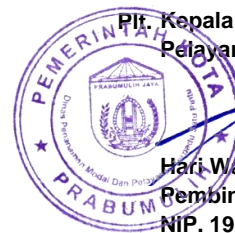
Hari Wahyudi, SH., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19811030 201101 1 001

NO	JENIS PERIZINAN & NON PERIZINAN	JUMLAH PENERBITAN PERIZINAN & NON PERIZINAN											TOTAL	
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER		DESEMBER
e. Sektor Perhubungan														31
1	Izin Dispensasi Masuk Kota	0	0	1	7	6	0		1	0	7	0	6	28
2	Izin Insidental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Izin Angkutan Barang Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
f. Sektor Pendidikan														91
1	Izin Penelitian	4	2	14	5	9	2	10	2	1	6	1	3	59
2	Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (TK, KB, dan TPA)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
3	Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (TK, KB, dan TPA)	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	7
4	Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
5	Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	5
6	Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Izin Operasional Sekolah Dasar (SD)	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	6
8	Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	Izin Pendirian Program Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
11	Izin Operasional Program Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	5
Total		140	57	187	55	137	109	107	89	70	109	20	87	1167

SUMBER : SICANTIK CLOUD, SIMBG, DAN BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DPMPSTP KOTA PARABUMULIH

Prabumulih, 6 Januari 2025

Pjt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih,



Hari Wahyudi, SH, M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 198110302011011001